

JURNAL AKUNTANSI



DOI: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2>

p-ISSN 2088 - 768X

e-ISSN 2540 - 9646

**VOLUME 5
NOMOR 2
DESEMBER 2017**

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

Dewi Kusuma Wardani
Ika Andriyani

PENGARUH KUALITAS AUDIT, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Dody Hapsoro
Arla Aulia Annisa

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KOMPARASI PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

Sri Suranta
Bandi
Halim Dedy Perdana
M. Syafiqurrahman

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (STUDI KASUS PADA RSUD DI SUMATERA SELATAN)

Rika Henda Safitri
Asfeni Nurullah
Burhanuddin

PENGARUH ROA, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Siti Nur Faizah
Vidya Vitta Adhivinna

KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR

Ita Wulandari
Dr. Siti Musyarofah
Muhammad Asim Asy'ari

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY

Sisilia Novi Ratnasari
Yennisa

PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015)

Mudasetia
Nur Solikhah

**JURNAL AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

PENANGGUNGJAWAB

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

PEMIMPIN REDAKSI

Dewi Kusuma W, SE, S.Psi., M.Sc., Ak., CA

REDAKSI

Sri Ayem, SE., M.Sc., Ak. CA
Taufan Adi Kurniawan, SE., M. Acc., Ak., CA
Yhoga Heru Pratama, SE

MITRA BESTARI

Atika Jauharia Hatta, STIE YKPN
Dody Hapsoro, STIE YKPN
Fauzan Misra, Universitas Andalas Padang
Hendrawan Santosa Putra, Universitas Jember
Maulana, Universitas Tamansiswa Palembang
Riha Dedi Priantana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Sri Hermuningsih, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat Redaksi:

Redaksi Jurnal Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara No. 121, Lt-2 Yogyakarta
e-mail: jurnal_akuntansi@ustjogja.ac.id , Telp/Fax: (0274) 557455

Redaksi menerima artikel hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Redaksi berhak meringkas, mengurangi, dan memperbaiki format tulisan yang akan dimuat dalam jurnal tanpa mengubah substansi dari isi dan tulisan. Naskah diketik dalam format 2 (dua) spasi pada kertas A4, dengan garis tepi kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak dengan bahasa Inggris bagi tulisan/karya ilmiah berbahasa Inggris. Panjang artikel antara 10 – 20 halaman (2500-5000 kata). Pengiriman harus menyertakan cetakan naskah hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar dan menyertakan softcopy berupa CD. Penulis menyertakan biodata (Nama, Alamat, Alamat Kantor, No. Telp, e-mail). Penulis akan mendapatkan 2 eksemplar naskah yang diterbitkan. Naskah konseptual memuat komponen: Judul, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, Metodologi Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan-Implikasi-Saran-Keterbatasan, dan Daftar Pustaka.

JURNAL AKUNTANSI



DOI: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2>

p-ISSN 2088 - 768X

e-ISSN 2540 - 9646

**VOLUME 5
NOMOR 2
DESEMBER 2017**

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

Dewi Kusuma Wardani
Ika Andriyani

PENGARUH KUALITAS AUDIT, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Dody Hapsoro
Arla Aulia Annisa

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KOMPARASI PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

Sri Suranta
Bandi
Halim Dedy Perdana
M. Syafiqurrahman

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (STUDI KASUS PADA RSUD DI SUMATERA SELATAN)

Rika Henda Safitri
Asfeni Nurullah
Burhanuddin

PENGARUH ROA, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Siti Nur Faizah
Vidya Vitta Adhivinna

KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR

Ita Wulandari
Dr. Siti Musyarofah
Muhammad Asim Asy'ari

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY

Sisilia Novi Ratnasari
Yennisa

PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015)

Mudasetia
Nur Solikhah

EDITORIAL

JURNAL AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah terbit Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Vol. 5 No. 2 Desember 2017. Fakultas Ekonomi khususnya program studi Akuntansi sangat berbahagia dapat secara konsisten menerbitkan jurnal akuntansi.

Program studi akuntansi ternyata di tahun 2013 dapat melangkah konsisten dalam menerbitkan jurnal akuntansi dengan jumlah sama, semoga dimasa mendatang masih dapat berjalan sukses dan lancar. Semangat giat belajar sepanjang hayat menjadikan kontribusi mahasiswa dan dosen dapat melakukan semangat maju dari sisi karya ilmiah.

Maju dengan niat ilmu sebagai panglima cukup membawa angin segar, layar perubahan sudah berkembang. Potensi Fakultas dan Program Studi mendukung, semoga menjadi hari-hari yang membahagiakan semua pihak.

Pelajaran yang diperoleh melalui karya ilmiah ini adalah, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat adalah niat yang besar yakni Maju Bersama Ekonomi Kerakyatan Berasaskan Ajaran Hidup Tamansiswa mulai ada titik terang karena mau bekerja sama.

Terima kasih yang telah mendukung, ramai-ramai maju bersama melalui Fakultas Ekonomi dengan menjadi masyarakat ilmiah yang terus berjuang menjadi manusia kritis dengan menulis di Jurnal Akuntansi.

Selamat Berjuang

Yogyakarta, Juni 2017
Redaksi Jurnal Akuntansi

DAFTAR ISI
JURNAL AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN	88
Dewi Kusuma Wardani Ika Andriyani	
PENGARUH KUALITAS AUDIT, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA	99
Arla Aulia Annisa Dody Hapsoro	
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KOMPARASI PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN	111
Sri Suranta Bandi Halim Dedy Perdana M. Syafiqurrahman	
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (Studi Kasus Pada Rsud Di Sumatera Selatan)	125
Rika Henda Safitri Asfeni Nurullah Burhanuddin	
PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE	136
Siti Nur Faizah Vidya Vitta Adhivinna	
KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR	146
Ita Wulandari Dr. Siti Musyarofah Muhammad Asyim Asy'ari	
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY	159
Sisilia Novi Ratnasari Yennisa	
PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015)	167
Mudasetia Nur Solikhah	



PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KLATEN

Dewi Kusuma Wardani *
 Ika Andriyani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the effect implementation of the influence of human resource quality, exploiting of information technology, and internal control system for reliability of the Government Financial Reporting Countability village in Klaten district. This research is causative research. The population in this study is the village in Klaten district government, especially government Manisrenggo village in the district and every village government was represented by seven people that the village head and village as respondents. Data collection is done directly by using a questionnaire. While the tools of analysis used was multiple regression with SPSS program version 16.0. The results show that the variable human resource quality and internal control system have influence to reliability of financial reporting in the Klaten district of the village administration, while exploiting of information technology has no influence to reliability of financial reporting in the Klaten district of the village administration

INFO ARTIKEL

Diterima: 3 Agustus 2017
 Direview: 4 Agustus 2017
 Disetujui: 31 Oktober 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Reliability of Financial Reporting, Human Resource Quality, Exploiting of Information Technology, and Internal Control System

PENDAHULUAN

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (www.bpkp.go.id). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 mendapat kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Alokasi dana sebesar itu baru pertama kali dalam sejarah APBN Republik Indonesia. Penggunaan dana tersebut harus dikelola secara akuntabel di tengah minimnya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa khususnya desa-desa yang berada di Kabupaten Klaten (www.ugm.ac.id).

Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat desa. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya yaitu keandalan. Ariesta (2013) menyatakan Keandalan adalah suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam pelaporan keuangan pemerintahan desa mampu memberikan informasi yang andal/valid dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, sehingga masyarakat desa percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar.

Mengutip dari Karmila (2012) keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten dipengaruhi berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, dan sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan. Hal pertama yang mungkin mempengaruhi adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dilihat dari kualitas sumber daya manusia desa yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (www.ugm.ac.id). Hal ini menyebabkan Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan desa khususnya desa-desa di Kabupaten Klaten berkaitan dengan teknologi informasi masih sangat kurang. Banyak yang belum paham komputer bahkan ada yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung keterandalan pelaporan keuangan desa (www.solopos.com).

Sistem pengendalian intern merupakan hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud), sehingga laporan keuangan memberikan keyakinan keandalan.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sudah pernah dilakukan oleh Karmila dkk, (2012) yang menemukan bukti empiris bahwa hanya pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten".

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan

Afrianti (2011) menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga

sumber daya manusia (SDM) tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi,

Lebih lanjut Ariesta (2013) menyatakan apabila sumber daya manusia pelaku sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi akan memiliki kualitas yang rendah. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut Ariesta (2013) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Lebih lanjut Pramudiarta (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Sistem Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa

Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Jika SPI tinggi maka proses akuntansi dapat diarahkan, diawasi, dan dapat dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan yang andal. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sistem Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa pada desa-desa di Kabupaten Klaten. Sampel dalam penelitian ini pemerintah desa pada desa-desa di Kecamatan Manisrenggo. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode Purposive sampling.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisi-operasionalkan variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengertian tentang Sumber Daya Manusia sesuai dengan Afrianti (2011) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Tabel 1
Pengembangan Instrumen Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Kemampuan individu	1. Pemerintah desa anda memiliki staf yang mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai standar akuntansi. 2. Staf pemerintah desa anda belum mampu menyusun laporan keuangan desa.
2. Peran dan fungsi untuk mencapai tujuan	3. Pemerintah desa anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 4. Peran dan tanggungjawab seluruh staf pemerintah desa anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan desa.
3. Memahami prosedur dan proses akuntansi	5. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi. 6. Uraian tugas staf pemerintah desa anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. 7. Pemerintah desa anda telah melakukan proses akuntansi.
4. Pelatihan yang teratur	8. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber peralatan, pelatihan yang dibutuhkan. 9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Zuliarti (2012) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Indikator pemanfaatan teknologi informasi diambil dari penelitian Pramudiarta (2015) dan Nihayah (2015).

Tabel 2
Pengembangan Instrumen Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Proses kerja secara elektronik	1. Pemerintah desa anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
2. Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan	2. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet	3. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja desa.
4. Sistem manajemen	4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer	5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 6. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. 7. Sistem keamanan komputer (antivirus) diperbarui secara teratur.

3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60 tahun 2008). Adapun indikatornya adalah perancangan yang memadai, pemisahan wewenang, dan tindakan disiplin atas pelanggaran mengambil referensi dari Pramudiarta (2015) dan Nihayah (2015).

Tabel 3
Pengembangan Instrumen Sistem Pengendalian Internal

Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Perancangan yang memadai	1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP). 2. Pembuatan serta penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
2. Pemisahan wewenang	3. Adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 4. Dalam melakukan transaksi belum adanya pemisahan wewenang secara tepat
3. Tindakan disiplin atas pelanggaran	5. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

4. Keandalan

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (PP No. 24 Tahun 2005)

Tabel 4
Pengembangan Instrumen Keandalan

Pernyataan	Item Pernyataan dalam Kuesioner
1. Penyajian jujur	1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2. Realisasi	2. Penyajian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. 3. Laporan keuangan disampaikan secara sistematis dan teratur.
3. Rekonsiliasi	4. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
4. Informasi dapat diuji	5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
5. Netralisasi	6. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Pengarahan Informasi	7. Informasi yang dibutuhkan belum tersedia ketika diminta.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Namun, sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu melakukan uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, peneliti melakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Menurut Ghozali (2011), untuk memastikan bahwa data berkualitas, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Dari uji validitas dihasilkan r hitung $>$ r tabel yaitu diatas 0,223. Dari uji reliabilitas diperoleh hasil Cronboach-Alpha dengan nilai $>$ 0,70. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua variabel valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov test diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,593 lebih besar daripada 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikan 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian pula dengan uji multikolinieritas, dimana nilai tolerance $>$ 0,1 dan VIF $<$ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi multikolinieritas.

Pengujian Hipotesis

Uji Model/Goodness of Fit (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di bawah ini diperoleh nilai F sebesar 16,673 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, berarti salah satu dari ketiga variabel independen tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Tabel 5
Hasil Uji Model/Goodness of Fit (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	246.892	3	82.297	16,673	.000 ^a
	Residual	365.262	74	4.936		
	Total	612.154	77			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Berdasarkan tabel 3 dapat jabarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 11,316 + 0,237X_1 + 0,008X_2 + 0,449X_3 + \epsilon$$

Tabel 2
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	11.316	2.566		4.409	.000
	X ₁ : Kualitas Sumber Daya Manusia	.237	.096	.324	2.462	.016
	X ₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi	.008	.062	.013	.127	.899
	X ₃ : Sistem Pengendalian Intern	.449	.169	.354	2.661	.010

Sumber : Data primer diolah 2016

Hipotesis 1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi $0,016 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,462 > t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Hipotesis 2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Dari tabel 2 dapat di lihat nilai signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi $0,899 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,127 < t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Hipotesis 3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Dari tabel 2 dapat di lihat nilai signifikan variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi $0,1 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,661 > t_{tabel} 1,6646$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintahan Desa.

Koefisien Determinasi

Pada output SPSS model summary menunjukkan besarnya adjusted R square sebesar 0,379 yang berarti Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa dipengaruhi 37,9 % oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian, seperti pengawasan keuangan daerah.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 ^a	.403	.379	2.222

a. Predictors : (Constat), X3, X2, X1

b. Dependent : Variabel Y

Sumber : Data Primer Diolah 2016

Pada penelitian ini, hipotesis 1 yang diajukan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dari hasil uji hipotesis 1, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.462 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,6646 dengan tingkat signifikan 0,016. Maka dari hasil tersebut H_1 terdukung dan H_0 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan teori yang mengatakan kurangnya jumlah pegawai akuntansi serta latar belakang pendidikan akuntansi pada subbagian akuntansi/tata usaha keuangan pada perangkat desa yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan adalah benar, karena dengan jumlah yang cukup serta memiliki latar pendidikan akuntansi, maka perangkat desa yang bekerja akan dapat menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan tepat dan baik.

Kondisi secara praktik di lapangan berbeda karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi dalam bidang akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap perangkat desa untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberdayaan perangkat desa yang telah ada. Dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang bertema akuntansi dan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mengimbangi kelemahan yang ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Ariesta (2013), dan Sembiring (2013). Hal ini disebabkan kondisi pemerintah desa yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah/desa. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Zuliarti (2012), Husna (2013), dan Arfianti (2011) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada penelitian ini, hipotesis 2 yang diajukan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hasil pengujian hipotesis 2 adalah nilai t hitung sebesar 0,127 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,6646 dengan tingkat signifikan 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain, H_2 ditolak dan H_0 terdukung.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan TI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan Zuliarti (2012), Nihayah (2015), Ariesta (2013), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Sembiring (2013) yang menyimpulkan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ke-tidaksignifikan-an ini mungkin disebabkan teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya banyak, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia, mahal namun tidak dapat mendukung kehandalan penyajian laporan keuangan.

Pada penelitian ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hasil pengujian hipotesis 3 adalah nilai t hitung sebesar 2,661 serta tingkat signifikan sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain, H_3 terdukung dan H_0 ditolak. Hasil tersebut memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh perangkat desa, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Arfianti (2011), Wansyah, dkk (2012), Husna (2013), dan Sembiring (2013) yang menghasilkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Karmila, dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Saran yang diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah :

a. Untuk Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten

Bagi pemerintah desa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal selain itu, pemerintah desa hendaknya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sehingga dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks.

b. Untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi dengan metode lain, misalnya dengan wawancara, agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel dependen penelitian, seperti dapat dibandingkan dan dapat dipahami atau dengan menambah variabel independen yang lain agar dapat menambah variasi dalam penelitian selanjutnya, contoh variabel lain yaitu pengawasan keuangan daerah.

REFERENSI

- Anonim. (5 Maret 2016). "Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Simda Desa) Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita): Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan". <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- Anonim. (5 Maret 2016). "Kelola Dana Rp 20 T, Seluruh Desa Perlu 'Akuntan Ndeso'". <http://ugm.ac.id/id/berita/10229-kelola.dana.rp.20.t.seluruh.desa.perlu.%E2%80%98akuntan.ndeso%E2%80%99>
- Anonim. (5 Maret 2016). "Pengelolaan Dana Desa BPKP Sosialisasikan Aplikasi Laporan Keuangan Desa Berbasis TI". <http://www.solopos.com/2016/03/01/pengelolaan-dana-desa-bpkp-sosialisasikan-aplikasi-laporan-keuangan-desa-berbasis-ti-696621>
- Arfianti, Dita. (2011). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ariesta, Fadila. (2013). "*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*". E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto. (2015). "Pengaruh Standar Pelaporan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Untuk Mendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Skripsi, Universitas Mercu Buana.
- Husna, Fadhilla. (2013). "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)". E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.

- Karmila, dkk. (2012). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)”. E-Jurnal, Universitas Riau.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramudiarta, Rizal. (2015). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)”. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sembiring, Febriady Leonard. (2013). “Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)”. E-Jurnal, Universitas Negeri Padang.
- Wansyah, Hendra, dkk. (2012). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh”. E-Jurnal, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. (2010). “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. E-Jurnal, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Zuliarti. (2012). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus”. Skripsi, Universitas Muria Kudus.



PENGARUH KUALITAS AUDIT, LEVERAGE, DAN GROWTH TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Arla Aulia Annisa
 Dody Hapsoro

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 STIE YKPN Yogyakarta
 auliaannisa95@gmail.com
 dodyhapsoro@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of audit quality, leverage, and growth on earnings management in manufacturing companies in Indonesia. Earnings management is defined as management actions interference form in the process of preparing financial statements with a view to improving welfare of personal and to increase the value of company.

This research is a quantitative research with secondary data. Sample in this research is manufacturing sector companies listed in BEI (Indonesia Stock Exchange) period 2012-2014. The number of samples used are 74 companies taken through purposive sampling with multiple linear regression analysis as a method of analysis.

Results of this research indicate that the quality of audit and growth have a positive and significant impact on earnings management, while leverage has a negative and significant effect on earnings management.

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Agustus 2017
 Direview: 22 Agustus 2017
 Disetujui: 1 November 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

audit quality, leverage, growth, earning management

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah media komunikasi yang umum digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Kurniawati, 2009). Manajemen perusahaan dapat membuat kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu dan digunakan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agent) yang menggunakan dana dari para prinsipal. Pada dasarnya ada kemungkinan terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pihak internal dengan pemegang saham dan kreditur sebagai pihak eksternal perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pihak eksternal mendorong manajemen melakukan tindakan yang menjadikan laporan keuangan yang dibuat terlihat baik, sehingga kinerja manajemen juga terlihat baik. Tindakan tersebut dikenal dengan manajemen laba.

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Salah satu cara untuk mengukur manajemen laba adalah dengan menggunakan proksi discretionary accrual. Discretionary accrual adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi.

Peran auditor dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang tidak berkualitas. Semakin berkualitas auditor, maka tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan diharapkan tidak akan terjadi. Kualitas audit dapat diukur dengan proksi reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), karena diasumsikan reputasi KAP tersebut akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya.

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan diduga akan melakukan manajemen laba karena terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Widyaningdyah (2001) dan Halim et al. (2005) mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan berdasarkan Jao dan Pagalung (2011) leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan perusahaan adalah adanya pertumbuhan aset (asset growth). Pertumbuhan aset mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan untuk membayar utang kepada pihak ketiga atau investor. Secara teori, jika terjadi pertumbuhan aset maka investor cenderung akan mempercayakan dananya untuk diinvestasikan pada perusahaan yang memiliki aset lebih tinggi. Jika perusahaan memiliki aset yang rendah, maka investor juga dapat melihat dari sisi lain pada laporan keuangan, misalnya pertumbuhan penjualan. Namun, aset yang tinggi atau rendah bukan merupakan jaminan dari pencapaian laba perusahaan. Oleh karena itu, salah satu upaya manajemen untuk menjaga agar laba perusahaan terlihat stabil dari tahun ke tahun sehingga meyakinkan investor untuk tetap menginvestasikan dananya ke perusahaan adalah dengan menggunakan strategi manajemen laba.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah menguji dan menemukan bukti empiris di Indonesia mengenai pengaruh kualitas audit, leverage, dan growth terhadap manajemen laba. Selain menggunakan variabel tersebut, peneliti juga menggunakan variabel kontrol yaitu nilai absolut dari akrual total, return on investment, arus kas dari aktivitas operasi, dan kapitalisasi nilai pasar.

LANDASAN TEORI

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak di mana satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sesuai dengan kontrak tersebut, pemegang saham (prinsipal) menyerahkan otoritas pengambilan keputusan kepada manajemen (agen). Dalam keadaan seperti ini tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa manajemen akan selalu bertindak yang terbaik sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Pada dasarnya ada kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal atas modal yang dipercayakan kepada manajemen. Sementara itu, manajemen berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan tersebut. Masalah keagenan ini mendorong dan memberi keleluasaan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara memilih dan menerapkan metode akuntansi selama tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Secara umum manajemen laba terjadi karena adanya pengungkapan yang kurang transparan dalam laporan keuangan. Menurut Pathak et al. (2014), pada dasarnya ada dua pola manajemen laba,

yaitu manajemen laba berbasis akrual dan manajemen laba riil. Manajemen laba berbasis akrual adalah manipulasi akuntansi melalui pemilihan kebijakan akuntansi dan penilaian pribadi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sebaliknya, manajemen laba riil mempengaruhi laba akuntansi melalui perubahan waktu pembiayaan, investasi, atau pengaturan operasi lainnya.

Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (agency cost) perusahaan dengan pemegang utang (bondholder) dan pemegang saham (shareholder) (Jensen dan Meckling, 1976). Auditing yang berkualitas akan mampu menurunkan jumlah kesalahan akuntansi yang dilakukan oleh klien. Hasil auditing ini dicerminkan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP. Nama baik KAP dianggap sebagai gambaran yang paling penting tentang dimensi kualitas auditor (Sanjaya, 2008).

Leverage adalah perbandingan antara utang dan aset yang menunjukkan beberapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin utang (Rahmadika, 2011). Leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga semakin meningkat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), dalam hipotesis debt covenant motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi atau proporsi utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi asetnya akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba.

Pertumbuhan perusahaan (growth) mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan perubahan tingkat pertumbuhan tahunan perusahaan dari aset total.

Perusahaan dengan pertumbuhan aset yang tinggi akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, investor dan para kreditur. Untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata publik dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah, investor dan kreditur, perusahaan akan mengurangi praktik manajemen laba. Perusahaan menghindari tersebarnya informasi tentang praktik-praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan melalui manajemen laba. Perusahaan akan menjaga citranya sehingga menghindari praktik-praktik yang dapat merusak citra perusahaan. Perusahaan juga menjaga agar informasi tentang perusahaan yang menyebar luas adalah informasi yang baik (Mutmainah, 2011).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Kualitas Auditor dengan Manajemen Laba

Auditor yang independen biasanya memiliki reputasi yang baik. Perusahaan akan menggunakan jasa auditor dengan reputasi yang baik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan mereka agar para stakeholder menyakini kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Mutmainah, 2011). Dengan independensinya, auditor akan memberikan opini sesuai hasil temuannya. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Independensi dan kualitas auditor akan berdampak terhadap pendeteksian praktik manajemen laba. Auditor yang bereputasi baik karena memiliki independensi dan kualitas yang baik diharapkan mampu mengurangi tindakan manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hubungan Leverage dengan Manajemen Laba

Widyaningdyah (2001) menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tarjo (2008). Temuan tersebut sesuai dengan debt covenant hypothesis yang menyatakan bahwa jika semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis akuntansi, maka manajer perusahaan

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode sekarang. Hal tersebut dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan akan naik sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan membayar utang-utangnya pada masa mendatang (Tarjo, 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Hubungan Growth dengan Manajemen Laba

Salah satu hal yang dapat memicu manajer untuk melakukan manajemen laba adalah keinginan untuk meminimalkan risiko politik (Scott, 1997: 303). Rekayasa laba dengan tujuan untuk meminimalkan risiko politik tersebut dikenal dengan istilah *political cost hypothesis*. Hipotesis *political cost* menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan lain sebagainya (Watts dan Zimmerman, 1978).

Terkait dengan *political cost* tersebut, AlNajjar dan Belkaoui (2001) menemukan hal yang menarik, yaitu ternyata perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi juga memiliki motivasi untuk meminimalkan laba. Tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pesat yang ditandai dengan tingginya tingkat set kesempatan investasi (*investment opportunity set/IOS*) akan tercermin dalam tingginya tingkat profitabilitas perusahaan (Saputro dan Setiawati, 2004). Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dibaca oleh pihak regulator dan pihak lain sebagai tingkat laba yang terlalu tinggi dan dapat memicu tuntutan yang tinggi terhadap perusahaan atau bahkan menimbulkan kecurigaan adanya monopoli. Indikasi monopoli akan menyebabkan perusahaan berhadapan dengan regulator (Cahan, 1992; Na'im dan Hartono, 1996). Penelitian AlNajjar dan Belkaoui (2001) membuktikan bahwa perusahaan dengan IOS yang tinggi atau perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi akan melakukan rekayasa penurunan laba atau manajemen laba.

Reynold et al. (2004) menyatakan bahwa *“high growing firms have incentives to meet earnings benchmark, thus they more likely to manage earnings*. Pernyataan ini mendukung argumen bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan, maka manajemen cenderung akan meningkatkan manajemen laba. Salah satu ukuran pertumbuhan perusahaan adalah pertumbuhan aset. Jika terjadi pertumbuhan aset, maka investor cenderung akan mempercayakan dananya untuk diinvestasikan pada perusahaan yang memiliki aset lebih tinggi. Jika perusahaan memiliki aset yang rendah, maka investor juga dapat melihat dari sisi lain yaitu laba. Oleh karena itu, salah satu upaya manajemen untuk menjaga agar laba perusahaan terlihat stabil dari tahun ke tahun sehingga meyakinkan investor untuk tetap menginvestasikan dananya ke perusahaan adalah dengan menggunakan strategi manajemen laba.

Hasil penelitian Gu et al. (2005) juga menyatakan adanya hubungan yang positif antara growth dengan manajemen laba. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini memprediksi bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Merujuk pada penelitian Gu et al. (2005), variabel pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan aset. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals*. Besarnya *discretionary accruals* dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling kuat (Sulistiyanto, 2008). Model ini menggunakan total accruals (TAC) yang

diklasifikasikan menjadi komponen discretionary accruals (DTAC) dan non discretionary accruals (NDA). Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total akrual dengan persamaan:

Total accruals (TAC) = Laba bersih setelah pajak (net income) – Arus kas dari aktivitas operasi (operating cash flow)

2. Menghitung nilai koefisien regresi α_1 , α_2 , dan α_3 dengan persamaan regresi ordinary least square (OLS):

$$\left(\frac{TAC_t}{A_{t-1}}\right) = \alpha_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \alpha_2\left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}\right) + \alpha_3\left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}}\right) + \varepsilon$$

Keterangan:

TAC_t = Total akrual perusahaan pada periode t

A_{t-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

ΔREV_t = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 (sebelumnya)

PPE_t = Aset tetap perusahaan pada akhir tahun t

3. Nilai koefisien regresi α_1 , α_2 , dan α_3 yang diperoleh kemudian digunakan untuk mencari nilai non discretionary accruals dengan cara berikut:

$$NDA_t = \alpha_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \alpha_2\left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}\right) + \alpha_3\left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}}\right)$$

Keterangan:

NDA_t = Non discretionary accruals pada tahun t

ΔREC_t = Piutang perusahaan pada tahun t dikurangi piutang perusahaan pada tahun t-1

4. Menghitung nilai discretionary accruals

$$DAC_t = \left(\frac{TAC_t}{A_{t-1}}\right) - NDA_t$$

Keterangan:

DAC_t = Discretionary accruals perusahaan pada tahun t

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas auditor

Variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan big four diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan big four diberi nilai 0.

2. Leverage

Leverage adalah perbandingan antara total utang dan total aset. Perbandingan itu menunjukkan besarnya aset yang digunakan untuk menjamin utang.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

3. Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Variabel pertumbuhan perusahaan didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahunan perusahaan dari aset total.

$$\text{Asset Growth} = \left(\frac{\Sigma \text{Aset} - \Sigma \text{Aset}_{t-1}}{\Sigma \text{Aset}_{t-1}}\right)$$

Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan agar hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai absolut dari total akrual

Variabel nilai absolut dari akrual total (AbsTAC) berguna untuk mengontrol kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa akrual (accrual-generating potential).

$$\text{AbsTAC} = \frac{|\text{TAC}|}{A_{t-1}}$$

Keterangan:

TAC_t = Total akrual perusahaan pada periode t

A_{t-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

2. Return on Investment

Return on investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROI digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan atas aset yang diinvestasikan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

3. Arus kas dari aktivitas operasi

Variabel arus kas dari aktivitas operasi dimasukkan untuk mengendalikan nilai discretionary accruals dari pengaruh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi (Rusmin, 2010).

$$\text{CFO} = \frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t}}{\text{Total aset perusahaan i pada tahun t-1}}$$

4. Kapitalisasi nilai pasar

Rachmawati et al. (2007) menggambarkan kapitalisasi nilai pasar sebagai rata-rata kapitalisasi pasar untuk perusahaan i selama periode pengujian.

$$\text{MKTCAP} = \text{Ln} (\text{Jumlah saham yang beredar} \times \text{Harga saham penutupan})$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2012-2014. Penentuan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi dan statistik deskriptif masing-masing variabel.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi

Variabel	N	1		0	
		N	Persentase	N	Persentase
BIG4	223	91	40,8%	132	59,2%

Berdasarkan Tabel 1, hasil distribusi frekuensi auditor big four (BIG4) yang diukur dengan variabel dummy menunjukkan bahwa sebanyak 91 laporan keuangan perusahaan atau setara dengan 40,8% sampel laporan keuangan perusahaan menggunakan jasa KAP big four dan sisanya sebanyak 132 laporan keuangan perusahaan atau setara dengan 59,2% menggunakan jasa KAP bukan big four.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
DA	223	0	4,92	0,7902	0,61114
LEV	223	0	4,30	0,5123	0,45128
GRT	223	-0,48	3,27	0,1449	0,27301
ROI	223	0	1,10	0,0794	0,11599
AbsTAC	223	0	0,40	0,0739	0,07101
CFO	223	-0,54	1,08	0,0728	0,12196
MKTCAP	223	24,33	48,77	31,4060	7,47551

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa leverage (LEV) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 4,30 dengan nilai rata-rata sebesar 0,5123, serta deviasi standar sebesar 0,4512. Growth (GRT) memiliki nilai minimum sebesar -0,48 dan nilai maksimum sebesar 3,27 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1449, serta deviasi standar sebesar 0,2730. Discretionary accruals (DA) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 4,92 dengan nilai rata-rata sebesar 0,7902, serta deviasi standar sebesar 0,6111. Nilai absolut dari akrual total (AbsTAC) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,40 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0739, serta deviasi standar sebesar 0,07101. Return on investment (ROI) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,10 dengan nilai rata-rata sebesar 0,794, serta deviasi standar sebesar 0,1159. Arus kas dari aktivitas operasi (CFO) memiliki nilai minimum sebesar -0,54 dan nilai maksimum sebesar 1,08 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0728, serta deviasi standar sebesar 0,12196. Kapitalisasi nilai pasar (MKTCAP) memiliki nilai minimum sebesar 24,33 dan nilai maksimum sebesar 48,77 dengan nilai rata-rata sebesar 31,40, serta deviasi standar sebesar 7,47.

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,087 dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yang digunakan, maka dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3
Uji Normalitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Signifikansi	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,087	0,05	Distribusi normal

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai tolerance dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
BIG4	0,809	1,237
LEV	0,938	1,066
GRT	0,886	1,129
ROI	0,854	1,171
AbsTAC	0,837	1,195
CFO	0,756	1,323
MKTCAP	0,840	1,190

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil output pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel independen (BIG4, Leverage, Growth) dan variabel kontrol (Return on Investment, Nilai Absolut dari Akrua Total, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dan Kapitalisasi Nilai Pasar) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Signifikansi	Kesimpulan
BIG4	0,732	0,05	Homoskedastisitas
LEV	0,852	0,05	Homoskedastisitas
GRT	0,161	0,05	Homoskedastisitas
ROI	0,684	0,05	Homoskedastisitas
AbsTAC	0,453	0,05	Homoskedastisitas
CFO	0,680	0,05	Homoskedastisitas
MKTCAP	0,690	0,05	Homoskedastisitas

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,005. Nilai Durbin-Watson 2,005 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1.84513 dan kurang dari (4-dU) sebesar 2.15487 yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,599	0,359	0,338	0,49718	2,005

Persamaan Regresi

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	0,513	0,001
BIG4	0,186	0,002
LEV	-0,066	0,241
GRT	0,452	0,000
ROI	0,070	0,238
AbsTAC	-0,226	0,000
CFO	-0,181	0,004
MKTCAP	0,102	0,087

Persamaan:

$$DA_t = \alpha + \beta_1 \text{BIG4} + \beta_2 \text{LEV} + \beta_3 \text{GRT} + \beta_5 \text{ROI} + \beta_4 \text{AbsTAC} + \beta_6 \text{CFO} + \beta_8 \text{MKTCAP} + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 7 di atas, pada analisis regresi didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$DA_t = 0,513 + 0,186 \text{BIG4} - 0,066 \text{LEV} + 0,452 \text{GRT} + 0,070 \text{ROI} - 0,226 \text{AbsTAC} - 0,181 \text{CFO} + 0,102 \text{MKTCAP} + \varepsilon$$

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square (R²) adalah 0,338. Hal ini berarti bahwa 33,8% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel- variabel independen yaitu auditor big four, leverage, growth, nilai absolut dari total akrual, return on investment, arus kas dari aktivitas operasi, dan kapitalisasi nilai pasar. Sedangkan sisanya sebesar 66,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang dianalisis.

Pengujian Koefisien Regresi Serentak (F)

Tabel 8
Pengujian Koefisien Regresi Serentak

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	32,677	7	4,253	17,205	0,000
	Residual	50,239	215	0,247		
	Total	82,915	222			

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa model persamaan regresi yang diperoleh memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,05) dan F hitung sebesar 17,205 lebih besar dari F tabel sebesar 2,0523, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (t)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 ditunjukkan bahwa dari delapan variabel yang dimasukkan dalam model regresi, variabel kualitas audit (BIG4), growth (GRT), nilai absolut dari

akrual total (AbsTAC), dan arus kas dari aktivitas operasi (CFO) secara signifikan mempengaruhi manajemen laba (DA). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk BIG4 sebesar 0,002 ($p < 0,05$), GRT 0,000 ($p < 0,05$), AbsTAC 0,000 ($p < 0,05$), dan CFO 0,004 ($p < 0,05$). Sedangkan variabel leverage, return on investment, dan kapitalisasi nilai pasar tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi LEV sebesar 0,241 ($p > 0,05$), ROI sebesar 0,238 ($p > 0,05$), dan MKTCAP sebesar 0,087 ($p > 0,05$).

Tabel 9
Pengujian Koefisien Regresi Parsial

Variabel	t _{hitung}	Signifikansi
BIG4	3,066	0,002
LEV	-1,176	0,241
GRT	7,790	0,000
ROI	1,183	0,238
AbsTAC	-3,790	0,000
CFO	-2,879	0,004
MKTCAP	1,717	0,087

KESIMPULAN

Penelitian ini berisi model untuk menguji pengaruh kualitas auditor, leverage, dan growth terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KAP yang berafiliasi dengan the big four bukan merupakan jaminan terhadap berkurangnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan the big four, tetapi tidak mampu untuk menekan terjadinya praktik manajemen laba. Dengan kata lain, penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan the big four hanya sebagai upaya untuk mendapatkan citra positif dari pihak eksternal perusahaan.
2. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders (pihak ketiga). Tindakan monitoring yang ketat oleh pihak ketiga terhadap perusahaan menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders dan shareholders, sehingga leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan memiliki kecenderungan untuk menaikkan laba dengan tujuan untuk menarik perhatian investor agar tetap menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

1. Tahun pengamatan dalam penelitian dapat dikatakan ini terlalu singkat, yaitu hanya dari tahun 2012 hingga tahun 2014, sehingga membuat jumlah sampel penelitian relatif sedikit. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperpanjang periode pengamatannya agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih valid.
2. Penggunaan model untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba dalam penelitian ini mungkin belum mampu mendeteksi manajemen laba dengan baik atau tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan penggunaan model yang berbeda dalam menentukan discretionary accrual, sehingga dapat dilihat adanya manajemen laba dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda.

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah delapan variabel dengan Adjusted R² hanya sebesar 0,338. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambah variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap manajemen laba.

REFERENSI

- Achmad, Komarudin, Imam Subekti, dan Sari Atmini. 2007. Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar.
- AlNajjar, Fouad dan Ahmed Riahi-Belkaoui. 2001. Growth Opportunities and Earnings Management. *Managerial Finance*. 72-81.
- Cahan, Stefen F. 1992. The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis. *Accounting Review* (January): 77-95.
- Gu, Zhaoyang, C. J. Lee, J. G. Rosett. 2005. What Determines the Variability of Accounting Accruals? *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 24: 313-314
- Halim, Julia, Carmel Meiden, dan Rudolf Lumban Tobing. 2005. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Jao, R. and Gagaring Pagalung. 2011. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 43-54.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kurniawati, Fitri. 2009. Pengaruh Asimetri Informasi dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Mutmainah, S. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2008). Doctoral dissertation. Universitas Diponegoro.
- Naim, Ainun dan Jogiyanto Hartono. 1996. The Effect of Antitrust Investigations on the Management of Earnings: A Further Empirical Test of Political-Cost Hypothesis. *Kelola* 13: 126-141.
- Pathak, J., KH. Karim, S. Suh, Z. Zhang. 2014. Do Audit Committee and Characteristics of Board of Directors Influence Earnings Management? Electronic Copy Available at: <http://ssrn.com/abstract=2406080>
- Rahmadika, Nurina. 2011. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Rusmin. 2010. Auditor Quality and Earnings Management Singapore Evidence. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 25, Iss 7, pp 618-638.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 11, No. 1, hal. 97-116.
- Saputro, J. A. and L. Setiawati. 2004. Kesempatan Bertumbuh dan Manajemen Laba: Uji Hipotesis Political Cost. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 7(2), pp.251-263.
- Sulistiyanto, Sri. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. Jakarta: Grasindo.
- Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Watts, R. dan J. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.

Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3, No. 2, hal. 89-101.



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KOMPARASI PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

Sri Suranta
 Bandi
 Halim Dedy Perdana
 M. Syafiqurrahman

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret
 srisuranta@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Financial Performance of Regional Government both District Government and City Government between Central Java Province (West Indonesia Region) and South Kalimantan (Central Indonesia Region) after the enactment of regional autonomy. This study emphasizes the exist or no of differences in local government financial performance outlined by the dimensions: Regional Financial Independence, Fiscal Decentralization, Efficiency and Effectiveness of Original Income between Central Java and South Kalimantan provinces.

This study uses a sample of District and City Government Work Units in Central Java and South Kalimantan Provinces. The data used is obtained from Local Government Financial Report. The results of this study indicate differences in Financial Performance in terms of Regional Financial Independence, fiscal decentralization and efficiency in Central Java and South Kalimantan Provinces. Meanwhile, the ratio of effectiveness showed no difference between the two regions.

INFO ARTIKEL

Diterima: 23 November 2017
 Direview: 23 November 2017
 Disetujui: 27 November 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

local government financial performance, Central Java, South Kalimantan

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah pada masa Pra Reformasi ditetapkan melalui Undang-undang No. 5 tahun 1974. Kelahiran Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, serta mengatur pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Namun, dalam perjalanannya, nuansa sentralisasi dalam Undang-undang ini lebih kuat dibandingkan desentralisasi. Belum adanya kepastian mengenai kewenangan dan perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah serta adanya kekuasaan terpusat (sentralisasi), mengindikasikan bahwa tidak ada pemisahan antara peran eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Memasuki era reformasi pada pertengahan tahun 1998, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah terutama pada tingkat kabupaten/kota. Reformasi di Indonesia ini turut mengubah sistem kehidupan negara, seperti adanya tuntutan

Good Governance dan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Era Reformasi diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada Presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No 25 Tahun 1999.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2007). Ditetapkan juga Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Andriansyah, 2009). Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian terkait hal tersebut mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan good governance. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai.

Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kusufi, 2012). Padahal dari hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja

pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013).

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Dengan menggunakan rasio tersebut dapat digunakan menghitung kinerja keuangan daerah, berdasarkan uraian-uraian tersebut peneliti tertarik meneliti apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan, dengan membandingkan dengan dua provinsi yaitu antara pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan periode 2012–2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dijabarkan dengan dimensi: Kemandirian Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Pembiayaan, Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah antara propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Kalimantan Selatan terkait dengan lima dimensi, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan bahwa terdapat beberapa persoalan yang mengganggu pelaksanaan anggaran daerah. Salah satunya proporsi belanja daerah masih didominasi belanja birokrasi, termasuk untuk gaji pegawai. Berdasarkan pemantauan KPPOD, pada 2013 lalu sebanyak 276 Kabupaten/kota mengalokasikan 50 persen sampai 75 persen anggaran untuk belanja birokrasi. (<http://www.kppod.org>)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis yang terutama diwakili oleh luasnya skala persoalan yang harus diatasi. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kemudian, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik.

Berdasar persoalan-persoalan di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Desentralisasi Fiskal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dilihat dalam bentuk Desentralisasi Fiskal?
3. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan daerah dalam bentuk perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah (efisiensi)?
4. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan (efektifitas)?

LANDASAN TEORI

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2007:127) “merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.” Pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 yang dimaksud dari efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga rendah; efektif merupakan pencapaian pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; sedangkan bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupaun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisa menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD.

Menurut Halim (2007:127) penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu karena:

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
- b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan incremental budget yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah pendapatan persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara incremental maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misal adanya prinsip ‘‘yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikanya itu diperlukan biaya yang tidak efisien’’.
- c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun pada struktur APBD.

Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Munir, dkk (2004:101) beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang

diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayar pajak dan redistribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan redistribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Total Pendapatan Daerah (TPD) merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) merupakan pajak yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian didistribusikan antara pusat dan daerah otonomi. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi hasilnya maka suatu daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM dalam Munir (2004:106) menggunakan skala interval sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Munir, 2004:106

3. Rasio Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Ukuran ini menunjukkan tingkat efisiensi dari setiap penggunaan uang daerah. Rasio pertama dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan perencanaan sesuai prinsip-prinsip disiplin anggaran sehingga memungkinkan setiap pengeluaran belanja menghasilkan sisa anggaran. Semakin kecil rasio akan menunjukkan peran perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin baik. Rasio kedua mengukur pengendalian dan perencanaan anggaran belanja. Semakin kecil rasio akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mengurangi biaya lain-lain atau biaya taktis yang tidak jelas tujuan pemanfaatannya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan

efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semangkin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semangkin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan beberapa peneliti berikut. Florida (2006) meneliti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota Propinsi Sumatera utara. yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, yaitu sebesar 68%. Erniadi (2004) telah meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah ini menyimpulkan berikut ini. Analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa regulasi keuangan tidak secara keseluruhan memperbaiki rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil penelitian bahwa dari empat rasio kinerja mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio upaya fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efisiensi, diantaranya dua rasio berkembang positive berupaya kenaikan rata-rata kinerja yaitu rasio upaya fiskal dan rasio efisiensi, sisanya dua rasio berkembang negatif berupa penurunan kinerja yang signifikan setelah otonomi yaitu rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemampuan pembiayaan, (b) sebanyak tiga rasio kinerja keuangan yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemampuan pembiayaan dan rasio efisiensi anggaran tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam periode sebelum dan sesudah otonomi.

Halim (2007) telah melakukan kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota Malang dengan menggunakan metode diskriptif dan memperoleh kesimpulan bahwa realisasi APBD Kota Malang selama tahun 2000-2004 melebihi yang ditargetkan, yakni rata-rata sebesar 101,88%. Pertumbuhan realisasi APBD kota Malang selama tahun 2000-2004 namun demikian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang menurun, bahkan mengalami pertumbuhan minus dari tahun 2003-2004.

Susantih (2008) melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan”. Hasil analisis menyimpulkan kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat pertama dengan 63,81 persen, peringkat kedua yaitu Propinsi Jambi dengan nilai 62,22 persen, peringkat ketiga yaitu Propinsi Sumatera Selatan dengan 53,12 persen, peringkat keempat yaitu Propinsi Bangka Belitung dengan 51,95 persen dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.

Mega (2015) melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013”. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013, secara keseluruhan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara kedua provinsi tersebut.

Berdasar landasan teori dan riset sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah berikut ini.

H₁ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah.

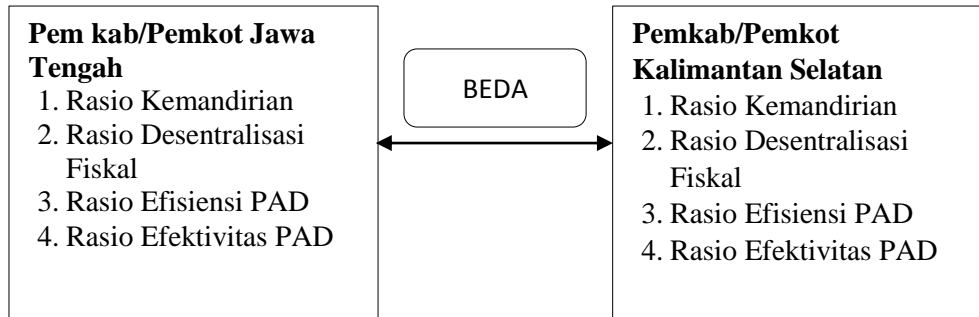
H₂ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Desentralisasi Fiskal.

H₃ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

H₄ : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 1

Kerangka Konseptual Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary accruals. Besarnya discretionary accruals dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling kuat (Sulistiyanto, 2008). Model ini menggunakan total accruals (TAC) yang diklasifikasikan menjadi komponen discretionary accruals (DTAC) dan non discretionary accruals (NDA). Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai total akrual dengan persamaan:
Total accruals (TAC) = Laba bersih setelah pajak (net income) – Arus kas dari aktivitas operasi (operating cash flow)
2. Menghitung nilai koefisien regresi α_1 , α_2 , dan α_3 dengan persamaan regresi ordinary least square (OLS):

$$\left(\frac{TAC_t}{A_{t-1}}\right) = \alpha_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \alpha_2\left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}\right) + \alpha_3\left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}}\right) + \epsilon$$

Keterangan:

- TAC_t = Total akrual perusahaan pada periode t
- A_{t-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)
- ΔREV_t = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 (sebelumnya)
- PPE_t = Aset tetap perusahaan pada akhir tahun t

3. Nilai koefisien regresi α_1 , α_2 , dan α_3 yang diperoleh kemudian digunakan untuk mencari nilai non discretionary accruals dengan cara berikut:

$$NDA_t = \alpha_1\left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \alpha_2\left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}\right) + \alpha_3\left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}}\right)$$

Keterangan:

- NDA_t = Non discretionary accruals pada tahun t
- ΔREC_t = Piutang perusahaan pada tahun t dikurangi piutang perusahaan pada tahun t-1

4. Menghitung nilai discretionary accruals

$$DAC_t = \left(\frac{TAC_t}{A_{t-1}}\right) - NDA_t$$

Keterangan:

- DAC_t = Discretionary accruals perusahaan pada tahun t

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas auditor

Variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan big four diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan big four diberi nilai 0.

2. Leverage

Leverage adalah perbandingan antara total utang dan total aset. Perbandingan itu menunjukkan besarnya aset yang digunakan untuk menjamin utang.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

3. Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Variabel pertumbuhan perusahaan didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahunan perusahaan dari aset total.

$$\text{Asset Growth} = \left(\frac{\Sigma \text{Aset}_t - \Sigma \text{Aset}_{t-1}}{\Sigma \text{Aset}_{t-1}} \right)$$

Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan agar hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai absolut dari total akrual

Variabel nilai absolut dari akrual total (AbsTAC) berguna untuk mengontrol kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa akrual (accrual-generating potential).

$$\text{AbsTAC} = \frac{|\text{TAC}|}{A_{t-1}}$$

Keterangan:

TAC_t = Total akrual perusahaan pada periode t

A_{t-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)

2. Return on Investment

Return on investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROI digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan atas aset yang diinvestasikan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

3. Arus kas dari aktivitas operasi

Variabel arus kas dari aktivitas operasi dimasukkan untuk mengendalikan nilai discretionary accruals dari pengaruh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi (Rusmin, 2010).

$$\text{CFO} = \frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t}}{\text{Total aset perusahaan i pada tahun t-1}}$$

4. Kapitalisasi nilai pasar

Rachmawati et al. (2007) menggambarkan kapitalisasi nilai pasar sebagai rata-rata kapitalisasi pasar untuk perusahaan i selama periode pengujian.

$$\text{MKTCAP} = \text{Ln} (\text{Jumlah saham yang beredar} \times \text{Harga saham penutupan})$$

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2012-2014. Penentuan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi dan statistik deskriptif masing-masing variabel.

Tabel 1
Distribusi Frekuensi

Variabel	N	1		0	
		N	Persentase	N	Persentase
BIG4	223	91	40,8%	132	59,2%

Berdasarkan Tabel 1, hasil distribusi frekuensi auditor big four (BIG4) yang diukur dengan variabel dummy menunjukkan bahwa sebanyak 91 laporan keuangan perusahaan atau setara dengan 40,8% sampel laporan keuangan perusahaan menggunakan jasa KAP big four dan sisanya sebanyak 132 laporan keuangan perusahaan atau setara dengan 59,2% menggunakan jasa KAP bukan big four.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
DA	223	0	4,92	0,7902	0,61114
LEV	223	0	4,30	0,5123	0,45128
GRT	223	-0,48	3,27	0,1449	0,27301
ROI	223	0	1,10	0,0794	0,11599
AbsTAC	223	0	0,40	0,0739	0,07101
CFO	223	-0,54	1,08	0,0728	0,12196
MKTCAP	223	24,33	48,77	31,4060	7,47551

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa leverage (LEV) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 4,30 dengan nilai rata-rata sebesar 0,5123, serta deviasi standar sebesar 0,4512. Growth (GRT) memiliki nilai minimum sebesar -0,48 dan nilai maksimum sebesar 3,27 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1449, serta deviasi standar sebesar 0,2730. Discretionary accruals (DA) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 4,92 dengan nilai rata-rata sebesar 0,7902, serta deviasi standar sebesar 0,6111. Nilai absolut dari akrual total (AbsTAC) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,40 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0739, serta deviasi standar sebesar 0,07101. Return on investment (ROI) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,10 dengan nilai rata-rata sebesar 0,794, serta deviasi standar sebesar 0,1159. Arus kas dari aktivitas operasi (CFO) memiliki nilai minimum sebesar -0,54 dan nilai maksimum sebesar 1,08 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0728, serta deviasi standar sebesar 0,12196. Kapitalisasi nilai pasar (MKTCAP) memiliki nilai minimum sebesar 24,33 dan nilai maksimum sebesar 48,77 dengan nilai rata-rata sebesar 31,40, serta deviasi standar sebesar 7,47.

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,087 dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yang digunakan, maka dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3
Uji Normalitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Signifikansi	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,087	0,05	Distribusi normal

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai tolerance dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
BIG4	0,809	1,237
LEV	0,938	1,066
GRT	0,886	1,129
ROI	0,854	1,171
AbsTAC	0,837	1,195
CFO	0,756	1,323
MKTCAP	0,840	1,190

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil output pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel independen (BIG4, Leverage, Growth) dan variabel kontrol (Return on Investment, Nilai Absolut dari Akrua Total, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dan Kapitalisasi Nilai Pasar) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Signifikansi	Kesimpulan
BIG4	0,732	0,05	Homoskedastisitas
LEV	0,852	0,05	Homoskedastisitas
GRT	0,161	0,05	Homoskedastisitas
ROI	0,684	0,05	Homoskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Tingkat Signifikansi	Kesimpulan
AbsTAC	0,453	0,05	Homoskedastisitas
CFO	0,680	0,05	Homoskedastisitas
MKTCAP	0,690	0,05	Homoskedastisitas

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,005. Nilai Durbin-Watson 2,005 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1.84513 dan kurang dari (4-dU) sebesar 2.15487 yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,599	0,359	0,338	0,49718	2,005

Persamaan Regresi

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	0,513	0,001
BIG4	0,186	0,002
LEV	-0,066	0,241
GRT	0,452	0,000
ROI	0,070	0,238
AbsTAC	-0,226	0,000
CFO	-0,181	0,004
MKTCAP	0,102	0,087

Persamaan:

$$DA_t = \alpha + \beta_1 \text{BIG4} + \beta_2 \text{LEV} + \beta_3 \text{GRT} + \beta_5 \text{ROI} + \beta_4 \text{AbsTAC} + \beta_6 \text{CFO} + \beta_8 \text{MKTCAP} + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 7 di atas, pada analisis regresi didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$DA_t = 0,513 + 0,186 \text{BIG4} - 0,066 \text{LEV} + 0,452 \text{GRT} + 0,070 \text{ROI} - 0,226 \text{AbsTAC} - 0,181 \text{CFO} + 0,102 \text{MKTCAP} + \varepsilon$$

Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square (R²) adalah 0,338. Hal ini berarti bahwa 33,8% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel- variabel independen yaitu auditor big four, leverage, growth, nilai absolut dari total akrual, return on investment, arus kas dari aktivitas operasi, dan kapitalisasi nilai pasar. Sedangkan sisanya sebesar 66,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang dianalisis.

Pengujian Koefisien Regresi Serentak (F)

Tabel 8
Pengujian Koefisien Regresi Serentak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,677	7	4,253	17,205	0,000
	Residual	50,239	215	0,247		
	Total	82,915	222			

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa model persamaan regresi yang diperoleh memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,05) dan F hitung sebesar 17,205 lebih besar dari F tabel sebesar 2,0523, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (t)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 ditunjukkan bahwa dari delapan variabel yang dimasukkan dalam model regresi, variabel kualitas audit (BIG4), growth (GRT), nilai absolut dari akrual total (AbsTAC), dan arus kas dari aktivitas operasi (CFO) secara signifikan mempengaruhi manajemen laba (DA). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk BIG4 sebesar 0,002 ($p < 0,05$), GRT 0,000 ($p < 0,05$), AbsTAC 0,000 ($p < 0,05$), dan CFO 0,004 ($p < 0,05$). Sedangkan variabel leverage, return on investment, dan kapitalisasi nilai pasar tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi LEV sebesar 0,241 ($p > 0,05$), ROI sebesar 0,238 ($p > 0,05$), dan MKTCAP sebesar 0,087 ($p > 0,05$).

Tabel 9
Pengujian Koefisien Regresi Parsial

Variabel	t _{hitung}	Signifikansi
BIG4	3,066	0,002
LEV	-1,176	0,241
GRT	7,790	0,000
ROI	1,183	0,238
AbsTAC	-3,790	0,000
CFO	-2,879	0,004
MKTCAP	1,717	0,087

KESIMPULAN

Penelitian ini berisi model untuk menguji pengaruh kualitas auditor, leverage, dan growth terhadap manajemen laba. Dari hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KAP yang berafiliasi dengan the big four bukan merupakan jaminan terhadap berkurangnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan the big four, tetapi tidak mampu untuk menekan terjadinya praktik manajemen laba. Dengan kata lain, penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan the big four hanya sebagai upaya untuk mendapatkan citra positif dari pihak eksternal perusahaan.
2. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders (pihak ketiga). Tindakan monitoring yang ketat oleh pihak ketiga terhadap perusahaan menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders dan shareholders, sehingga leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
3. Growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan memiliki kecenderungan untuk menaikkan laba dengan tujuan untuk menarik perhatian investor agar tetap menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

1. Tahun pengamatan dalam penelitian dapat dikatakan ini terlalu singkat, yaitu hanya dari tahun 2012 hingga tahun 2014, sehingga membuat jumlah sampel penelitian relatif sedikit. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperpanjang periode pengamatannya agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih valid.
2. Penggunaan model untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba dalam penelitian ini mungkin belum mampu mendeteksi manajemen laba dengan baik atau tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan penggunaan model yang berbeda dalam menentukan discretionary accrual, sehingga dapat dilihat adanya manajemen laba dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah delapan variabel dengan Adjusted R² hanya sebesar 0,338. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambah variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap manajemen laba.

REFERENSI

- Achmad, Komarudin, Imam Subekti, dan Sari Atmini. 2007. *Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar.
- AlNajjar, Fouad dan Ahmed Riahi-Belkaoui. 2001. *Growth Opportunities and Earnings Management*. *Managerial Finance*. 72-81.
- Cahan, Stefen F. 1992. *The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis*. *Accounting Review* (January): 77-95.
- Gu, Zhaoyang, C. J. Lee, J. G. Rosett. 2005. *What Determines the Variability of Accounting Accruals?* *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 24: 313-314
- Halim, Julia, Carmel Meiden, dan Rudolf Lumban Tobing. 2005. *Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45*. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Jao, R. and Gagaring Pagalung. 2011. *Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 43-54.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.

- Kurniawati, Fitri. 2009. Pengaruh Asimetri Informasi dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Mutmainah, S. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2008). Doctoral dissertation. Universitas Diponegoro.
- Naim, Ainun dan Jogiyanto Hartono. 1996. The Effect of Antitrust Investigations on the Management of Earnings: A Further Empirical Test of Political-Cost Hypothesis. *Kelola* 13: 126-141.
- Pathak, J., KH. Karim, S. Suh, Z. Zhang. 2014. Do Audit Committee and Characteristics of Board of Directors Influence Earnings Management? Electronic Copy Available at: <http://ssrn.com/abstract=2406080>
- Rahmadika, Nurina. 2011. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Rusmin. 2010. Auditor Quality and Earnings Management Singapore Evidence. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 25, Iss 7, pp 618-638.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2008. Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 11, No. 1, hal. 97-116.
- Saputro, J. A. and L. Setiawati. 2004. Kesempatan Bertumbuh dan Manajemen Laba: Uji Hipotesis Political Cost. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 7(2), pp.251-263.
- Sulistyanto, Sri. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris. Jakarta: Grasindo.
- Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Watts, R. dan J. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 2, hal. 89-101.



PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015)

**Mudasetia
 Nur Solikhah**

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
 ikhahzaza@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aimed to empirically analyze the effect of independence, corporate governance mechanisms (stock institutional ownership percentage, the percentage of stock ownership management, audit committees, independent directors) and quality audit of the integrity of financial report.

The population in this research are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) over the period 2011-2015. The sample used in this research are 39 companies to obtain a sample of 195 observation data using purposive sampling.

The conclusion is there is no significant effect between independence, percentage of institutional stock ownership, percentage of stock ownership management, audit committee, independent commissioner on the integrity of financial report and significant effect on the integrity of the quality audit of financial report.

INFO ARTIKEL

Diterima: 27 November 2017
 Direview: 21 Desember 2017
 Disetujui: 27 Desember 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

independence, institutional stock ownership percentage, percentage of stock ownership management, audit committees, independent directors.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan, oleh karena itu dalam proses pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan jujur kepada pengguna laporan keuangan. Menurut Mayangsari (2003) laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur merupakan definisi dari integritas laporan keuangan. Tercantum pada SAK (2004) bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar.

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, dalam menaksir pertanggungjawaban dan kinerja manajemen yang menjadi perhatian utama adalah informasi laba. Hal ini menjadi motivasi dan dorongan bagi manajemen untuk berusaha secara maksimal dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan agar hasil yang dilaporkan pada akhir periode tahun buku dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat. Namun disisi lain, peraturan ini justru menjadi motivasi dan dorongan bagi manajemen untuk melakukan fraud melalui

manipulasi laporan keuangan dan manajemen laba. Akibatnya laporan keuangan menjadi kurang handal karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan menjadi tidak relevan bagi pihak yang menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan karena interpretasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat.

Kasus manipulasi data akuntansi terjadi pada beberapa perusahaan besar seperti Enron, Tyco, Global Crossing, Worldcom, Toshiba, dan beberapa perusahaan yang berada di Indonesia seperti PT. Kimia Farma, Bank Lippo dan bank Century yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang bagus. Setelah dilakukan penelitian pada perusahaan Enron ternyata kasus manipulasi data akuntansi ini melibatkan banyak pihak, dan kebanyakan adalah pihak dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya CEO, Komisaris, Komite audit, Internal audit, sampai kepada eksternal auditor. Terungkapnya kasus seperti ini akan membuat kepercayaan masyarakat menurun, khususnya masyarakat keuangan, yang ditandai dengan turunnya harga saham dari perusahaan tersebut.

Kasus manipulasi data keuangan yang banyak terjadi dapat membuktikan bahwa kurang integritasnya laporan keuangan dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Dan terbuktinya masalah manipulasi data akuntansi dapat menyebabkan timbulnya banyak pertanyaan bagi masyarakat luas terhadap berbagai pihak terutama sistem pengelolaan dalam perusahaan dan sistem kepemilikan yang tersebar secara luas yang sering disebut dengan istilah corporate governance, yang memberitahukan kenyataan bahwa mekanisme good corporate governance yang baik belum diterapkan pada perusahaan tersebut. Susiana dan Herawati (2007) menyatakan belum diterapkannya mekanisme good corporate governance yang baik pada perusahaan dapat menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari terpuruknya harga saham. Tetapi hal tersebut menyebabkan masyarakat sebagai pengguna data atau laporan keuangan merasa dirugikan, karena mereka tidak memberikan informasi yang benar dan sejujur-jujurnya.

Darmawati (2004) dalam Addiyah (2014) menyatakan bahwa penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Penerapan corporate governance merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip corporate governance merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan corporate governance di Indonesia sangat penting, karena prinsip corporate governance dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertindas dan dapat bersaing secara global.

FCGI (2003) mengungkapkan dengan adanya sistem good corporate governance para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena corporate governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. Corporate governance juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di kantor korporat. Dalam hal ini corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Menurut Susiana dan Herawaty (2007) dalam kasus manipulasi data keuangan ini sebenarnya tidak hanya pihak dari dalam perusahaan saja yang bertanggung jawab, tetapi pihak luar juga sangat berpengaruh. Eksternal auditor juga harus ikut bertanggung jawab terhadap banyaknya kasus-kasus

manipulasi data akuntansi. Posisi akuntan publik yang dianggap sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan juga mulai banyak pertanyaan, apalagi setelah terbukti bahwa semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Sedangkan profesi akuntan sendiri mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang dapat diandalkan bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, serta bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Adanya hubungan positif antara kualitas audit dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yang pertama adalah alasan reputasi dan yang kedua adalah alasan kekayaan (deep pocket) yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian ini membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang beragumen bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP kecil, maka mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar pula bila mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat (putra,2012). Dengan adanya alasan-alasan tersebut maka KAP besar (big 4) lebih dipercaya oleh masyarakat atau pengguna laporan keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. KAP 4 besar yang disebutkan adalah price water house (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International dan Erns and Young (EY).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

LANDASAN TEORI

Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu bisa juga disebut dengan gambaran dari sebuah perusahaan. PSAK NO.1 (2013) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam SFAC No.2 mengenai Qualitative Characteristic OF Accounting Information, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (relevance) dan keandalan (reliability) menurut Kieso dan Weygandt dalam Astria (2011). Laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka harus memenuhi dua karakteristik utama dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

Pada penelitian Mayangsari (2003) integritas laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut: "Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur."

Independensi

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Independensi akuntan merupakan persoalan sentral dalam pemenuhan kriteria objektivitas dan keterbukaan. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional American Institute of Certified PublicAccountant (AICPA) tentang independensi mengatakan bahwa: "Anggota dalam praktik publik

harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standard yang disusun oleh lembaga lembaga yang dibentuk oleh dewan." Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena:

1. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.
2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor internal. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 1999 seksi 220 PSA No.04 Alinea 2, dijelaskan bahwa: "*Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya*".

Aspek Independensi

Menurut Taylor dalam Susiana dan Herawaty (2007) ada dua aspek independensi, yaitu:

1. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
2. Independensi penampilan (*image projected to the public/appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Corporate Governance

Krisis finansial di berbagai negara Asia pada tahun 1997-1998 telah memunculkan isu mengenai corporate governance mulai muncul sejak adanya krisis finansial di berbagai negara Asia pada tahun 1997-1998. Krisis finansial tersebut dipandang sebagai akibat lemahnya praktik corporate governance perusahaan. Skandal keuangan akibat lemahnya praktik CG terjadi juga di negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS) dengan adanya kasus Enron, Xerox, Merk & Co, WorldCom, Tyco, Global Crossing dan sejumlah perusahaan besar lainnya. Di Indonesia perusahaan besar yang terkena dampak krisis diantaranya adalah Kimia Farma dan Bank Lippo.

Pengertian corporate governance adalah: "*The roles of shareholders, directors and other managers in corporate decision making.*" Menurut Griffin dalam Susiana dan Herawaty (2007), Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Pada prinsipnya tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan.

Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Cadbury Commite adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Corporate Governance menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Corporate Governance menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Daniri (2005), corporate governance sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan juga pengukuran kinerjanya.

Dari definisi tentang Corporate Governance diatas, maka dapat diketahui adanya aspek-aspek penting dari Corporate Governance yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah:

1. Adanya keseimbangan antara organ-organ perusahaan diantaranya yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materiil dan relevan.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana auditor dapat melaporkan temuannya dengan baik atau tidak tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan menurut Christiawan dalam Singgih dan Bawono (2009) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya auditor yang kompeten adalah auditor yang "mampu" menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2005) dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensi auditor merupakan suatu standar auditing yang sangat penting karena mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan manajemen yang mana opini kewajarannya dibuat oleh seorang auditor. Terdapat dua aspek independensi yang perlu diperhatikan terutama dalam pengembangan konsep lebih lanjut. Pertama, independensi dalam arti yang sebenar-benarnya (real independence) dari auditor secara individual dalam kapasitasnya sebagai praktisi auditing (practitioner-independence). Kedua, Independensi penampilan (apparent independence) auditor dalam kapasitasnya sebagai kelompok profesional (profession-independence).

Masa kerja auditor atau masalah audit tenure dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sampai 5 tahun.

Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono dalam Hardiningsih (2010) menghasilkan temuan yang beragam diantaranya bahwa penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, karena akuntan dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah:

H1: terdapat pengaruh dari independensi seorang auditor terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Pengaruh Jumlah Komisaris Independen Terhadap Integritas laporan Keuangan

Komisaris Independen merupakan sebuah badan dalam sebuah perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Menurut Astria (2011) Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasehat kepada manajemen. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah:

H2a: Terdapat pengaruh dari jumlah komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Menurut Astria (2011) kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, manajer dalam perusahaan yang memiliki presentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur

sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan.

H2b: Terdapat pengaruh dari kepemilikan saham manajerial terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Kepemilikan saham Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon dalam Astria (2011) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H2c: Terdapat pengaruh dari kepemilikan saham Institusional terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Astria,2011). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis altertatif yang dikemukakan adalah:

H2d: Terdapat pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan big five dan non big five dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003).

Mayangsari (2003) melakukan penelitian pengaruh spesialisasi industri auditor sebagai proksi lain dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H3: Terdapat pengaruh dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2015, dengan tujuan mengetahui trend perkembangan integritas laporan keuangan pada tahun terbaru.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling, adapun kriteria-kriteria yang dipilih sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur selama 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 secara berturut-turut .
2. perusahaan menyampaikan laporan keuangan per tanggal 31 Desember yang telah diaudit.
3. Perusahaan menyampaikan data secara lengkap selama periode pengamatan berkaitan dengan variabel yang dipakai.
4. Perusahaan telah membentuk komite audit atau komisaris independen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Data penelitian ini meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan selama tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari situs resmi BEI (<http://www.idx.co.id>).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Deskriptif statistik adalah suatu data yang menjelaskan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar. Dari 39 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. deskriptif statistik masing-masing variabel penelitian dengan jumlah sampel 195. Nilai minimum independensi sebesar 1,00. Nilai Maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata sebesar 4,2 dan untuk standar deviasi sebesar 1,228. Nilai minimum persentase saham institusi sebesar 0,03, nilai maksimum sebesar 100, nilai rata-ratanya sebesar 39,296 dan standar deviasinya sebesar 28,317. Nilai minimum persentase saham manajemen sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 99,97, nilai rata-ratanya sebesar 60,29 dan standar deviasi sebesar 28,33. Nilai minimum komite audit sebesar 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-ratanya sebesar 3,081, dan standar deviasinya sebesar 0,424. Nilai minimum komisaris independen sebesar 1,00. Nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-ratanya sebesar 1,928 dan untuk standar deviasinya sebesar 0,927. Nilai minimum kualitas audit sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai rata-ratanya sebesar 0,76 dan standar deviasi sebesar 0,423. Nilai minimum integritas laporan keuangan sebesar 0,00. Nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai rata-rata integritas laporan keuangan sebesar 0,474 dan standar deviasi sebesar 0,50.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai distribusi normal sebagai syarat dapat dilakukan uji normalitas data adalah model regresi. Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan dilakukan uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S) pada program SPSS 16.0 for windows dan hasilnya adalah independensi, persentase saham manajemen, komite audit, komisaris independen, kualitas audit dan integritas laporan keuangan tidak signifikan karena nilainya di bawah 0,05 dan hanya terdapat satu data yang signifikan yaitu persentase saham institusi sebesar 0,199.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat adanya hubungan antar variabel independen dalam sebuah model dengan melihat VIF dan tolerance. Model asumsi klasik regresi linear mengharuskan tidak ada hubungan linear sempurna antar variabel independen (Gujati,2004). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 maka persamaan regresi tersebut tidak terjadimultikolinieritas. Hasil pengujiannya seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang

dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Nilai DW sebesar 0,622, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 195 (n) dan jumlah variabel independen 6 ($k=6$), maka nilai DW 0,622 lebih kecil dari batas atas (dU) 1,82 dan kurang dari $6 - 1.82$ ($6 - dU$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. diketahui bahwa setiap variabel dalam model regresi penelitian memiliki nilai sig diatas 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

Goodness of Fit

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 4,182 yang menunjukkan hasil lebih besar dari F tabel sebesar 2,15 dan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi integritas laporan keuangan atau dapat dikatakan bahwa Independensi, Mekanisme corporate governance (Persentase saham institusi, persentase saham manajemen, komite audit dan komisaris independen) dan Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Uji Hipotesis

Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$) secara sendiri atau masing-masing terhadap variabel dependen (Y). dapat dijelaskan bahwa Hasil variabel independensi memiliki signifikansi sebesar $0,072 > 0,05$ yang secara statistik tidak signifikan maka H_1 ditolak. Variabel persentase saham institusi memiliki signifikansi sebesar $0,154 > 0,05$ yang secara statistik tidak signifikan, maka H_2 ditolak. Persentase saham manajemen memiliki signifikansi sebesar $0,066 > 0,05$ yang secara statistik tidak signifikan maka H_3 ditolak. Komite audit memiliki signifikansi sebesar $0,246 > 0,05$ yang secara statistik tidak signifikan maka H_4 ditolak. Komisaris independen memiliki signifikansi sebesar $0,662 > 0,05$ yang secara statistik tidak signifikan maka H_5 ditolak. Kualitas audit memiliki signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ yang secara statistik signifikan maka H_6 diterima.

Uji Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena menggunakan lebih dari dua variabel. Analisis regresi berganda bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu independensi, good corporate governance (persentase kepemilikan saham institusi, persentasi kepemilikan saham manajemen, komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + e$$

$$Y = -0.305 + (-0.052(X1)) + 0.012(X2) + 0.016(X3) + (-0.093(X4)) + (-0.016(X5)) + (-0.181(X6)) + e$$

α = konstanta

β_1 - β_6 = koefisien regresi masing-masing variabel

x1 = Independensi

x2 = persentase saham institusional

x3 = persentase saham manajemen

x4 = komisaris independen

x5 = komite audit

x6 = kualitas audit

e = Standar error

persamaan diatas dapat diinterpretasikan:

1. Koefisien $\beta_1 = -0.052$ menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin tinggi independensi auditor maka akan semakin rendah integritas laporan keuangan.
2. Koefisien $\beta_2 = 0.012$ menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham institusi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin tinggi persentase kepemilikan saham institusi maka akan semakin tinggi integritas laporan keuangan.
3. Koefisien $\beta_3 = 0.016$ menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham manajemen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin tinggi persentase kepemilikan saham manajemen maka akan semakin tinggi integritas laporan keuangan.
4. Koefisien $\beta_4 = -0.093$ menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin rendah komite audit maka akan semakin rendah integritas laporan keuangan.
5. Koefisien $\beta_5 = -0.016$ menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin rendah komisaris independen maka akan semakin rendah integritas laporan keuangan.
6. Koefisien $\beta_6 = -0.181$ menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan artinya semakin tinggi kualitas auditor maka akan semakin rendah integritas laporan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. menunjukkan bahwa Adjusted R Square adalah 0,084, hal ini berarti 8,4% tingkat integritas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari enam variabel independen independensi, good corporate governance (persentase saham institusi, persentase saham manajemen, komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit. Sedangkan sisanya 91,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh independensi dengan mekanisme corporate governance (persentase kepemilikan saham institusi, persentase kepemilikan saham manajemen, komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dengan program SPSS 16.0. Pengambilan sampel dilakukan sesuai kriteria yang telah ditentukan dan didapat sebanyak 39 sampel perusahaan manufaktur. Maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa:

1. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

2. Persentase kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
3. Persentase kepemilikan saham manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
4. Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
5. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.
6. Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Data penelitian tidak terdistribusi normal
2. Populasi dan sampel dalam penelitian yang digunakan terbatas hanya 39 perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian yang menyatakan adanya pengaruh independensi, Mekanisme corporate governance dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan tidak dapat digeneralisasikan pada populasi atau jenis sampel perusahaan lain.
3. Variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya 3 variabel yaitu independensi, Mekanisme Corporate Governance (persentase kepemilikan saham institusi, kepemilikan saham manajemen, komite audit, komisaris independen) dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Sehingga pengaruh-pengaruh yang timbul diluar variabel yang digunakan belum dapat dibuktikan secara ilmiah.

Sebagai bahan perbaikan atas keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dengan menambahkan populasi dan sampel yang lebih banyak dan mampu mewakili berbagai jenis sektor perusahaan, tidak hanya disektor manufaktur tetapi sektor non manufaktur.
2. Menambah faktor-faktor lain yang mampu menjelaskan variance integritas laporan keuangan, sehingga perlu dikembangkan dalam review penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Achmad, Daniri. 2005. Konsep penerapan Good Corporate Governance dalam konteks Indonesia. Jakarta, Ray Indonesia.
- Arsiyanti, Ida. 2007. "Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan". Skripsi S1 FE Universitas Diponegoro.
- Astria, Tia. 2011. "*Analisis Pengaruh Audit Tenure, struktur Corporate Governance dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan*". Skripsi S1 FE Universitas Diponegoro.
- Bawono, Icku Rangga. & Singgih, Elisha Muliani. 2009. Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor dan *Kualitas Audit: Studi Pada Kap 'Big Four' di Indonesia*. Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Christiawan, Yulius Jogi. 2005. Kependensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.4. No. 2.
- Financial Accounting Standard Board 1980. "Statement of financial Accounting No.2 : *Qualitative Characteristics of Accounting Information*,".
- Gunadan, Welvin I dan Herawaty, Arleen. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Independensi auditor, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12, No.1, April 2010, Halaman 53-68.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program ibm SPSS 23. UNIVERSITAS DIPONEGORO. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati, 2010. "*Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*". Kajian Akuntansi, Pebruari 2010, Hal 61-76.

[Http://m.hukumonline.com/pusatdata/view/node/382](http://m.hukumonline.com/pusatdata/view/node/382) , di akses 13 Oktober 2016. 19.00 WIB.

<http://www.idx.co.id>

- Jama'an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporat Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Study kasus Perusahaan Publik yang Listing di BEJ. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mayangsari, S. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit,serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan. SNA.VI.Surabaya. 16 – 17Oktober 2003, pp. 1255–1273.
- Putra, Daniel Salfauz Tawakal, 2012. Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Manajemen Laba Terhadap Integritas laporan Keuangan. Skripsi S1 FE Universitas Diponegoro.
- Susiana dan Herawaty, Arleen. 2007. "*Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan*". SNA X Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Wardhani, Ratna. 2007. "Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 4 No.1, Juni 2007, 95–114.



ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (STUDI KASUS PADA RSUD DI SUMATERA SELATAN)

Rika Henda Safitri
 Asfeni Nurullah
 Burhanuddin

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
 Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan
 rikahenda@unsri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze cash flow ratio in funds managing at South Sumatera Regional State Hospital (RSUD) and to analyze hospital financial performance in South Sumatera based on the analysis of the cash flow ratio.

This research used quantitative descriptive analysis methodology by using cash flow ratio. This research used *hospital's cash flow report in financial report* as secondary data and information through internet and journal as the primary data.

Results indicate that the performance of the RSUD in South Sumatera is not good. It is shown by the results of the cash flow ratio analysis on average less than 1 and cash flow ratio analysis performance measurement method is not used because cash flow analysis ratio using a lot of equity as a data while in the RSUD the data is not showed.

INFO ARTIKEL

Diterima: 19 November 2017
 Direview: 20 November 2017
 Disetujui: 27 November 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

performance measurement, financial performance, ratio of cash flow, financial report, performance in hospital.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu perusahaan karena akuntansi berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan dalam bentuk sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Stie & Gama (2015) perusahaan dalam menjalankan operasinya memerlukan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu perusahaan perlu mengetahui perkembangan usahanya dari waktu ke waktu agar dapat diketahui perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Untuk dapat mengetahui hal tersebut pemilik perusahaan dapat melihat melalui laporan pertanggung jawaban pimpinan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 'alat penguji' dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Di era globalisasi sekarang ini setiap perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan supaya informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat dan akurat. Salah satu bentuk informasi keuangan adalah laporan arus kas. Menurut Mukhtarom, Kusumaningrum, & Ifanani (2015) arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Menurut PSAK No.2 (2002:5) Arus kas adalah arus masuk dan keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas bermanfaat bagi pihak internal perusahaan misalnya pemilik perusahaan, pihak manajemen, serta bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan baik itu kreditur, investor, maupun pemerintah dan masyarakat. Bagi pihak internal perusahaan dengan menganalisis laporan arus kas, pihak manajemen dapat mengetahui apakah keputusan yang telah diambil berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal memperoleh serta menggunakan kas tersebut dalam suatu periode tertentu. Sedangkan bagi pihak eksternal perusahaan dengan melihat laporan arus kas dapat membantu dalam menilai berbagai aspek dalam posisi keuangan perusahaan.

Menurut Sanger (2015) laporan arus kas dapat memberi informasi tentang perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi keadaan dan peluang. Selain itu Arus kas juga dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas, komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio.

Menurut Jooste (2006) menjelaskan mengenai tujuan dari laporan arus kas berdasarkan FASB dan menjelaskan mengenai kinerja keuangan di suatu perusahaan.

“According to the FASB, the primary purpose of the cash flow statement is to assess a company’s liquidity, solvency, viability and financial adaptability.

Cash flow ratios can be used to answer questions on a company’s performance since debt obligations are met with cash. Such an analysis will result in adequate lines of credit, unrestricted cash availability, debt maturity schedules with respect to financing requirements and the willingness to issue common equity. It will allow an analyst to examine a company’s financial health, and how the company is managing its operating, investment and financing cash flows (Palepu, Healy & Bernard 2000)”.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan Rumah Sakit milik pemerintah yang bergerak di Bidang Kesehatan. Kas merupakan elemen yang terpenting didalam rumah sakit untuk menunjang kegiatan operasional, oleh karena itu melalui analisa komponen arus kas, maka dapat diketahui bagaimana rumah sakit mengelola dana yang dimilikinya dan kesanggupan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa betapa pentingnya laporan arus kas dalam menilai kinerja keuangan suatu rumah sakit. Maka dari itu, peneliti ingin membuat penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Arus Kas sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (studi kasus pada RSUD di Sumatera Selatan)”**.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis rasio laporan arus kas dalam mengelola dana RSUD di Sumatera Selatan
2. Kinerja keuangan RSUD di Sumatera Selatan berdasarkan analisis rasio arus kas.

LANDASAN TEORI

Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mengemukakan pengertian laporan keuangan yaitu laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, *networth*, beban, dan pendapatan (termasuk *gain* dan *loss*), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan serta membantu dalam proses pengelolaan dana arus kas RSUD di Sumatera Selatan.

Pengertian Laporan Arus Kas

- a. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 Tahun 2009, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013). Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- b. Menurut Skousen dkk (2009), laporan arus kas (*statement of cash flow*) adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Fess (2006), laporan arus kas (*cash flow statement*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan.

Klasifikasi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut Skousen (2009) dalam (Kaunang, 2013) :

1. Aktivitas Operasi (*Operating Activities*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Arus kas dalam aktivitas ini biasanya didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Arus kas masuk adalah kas yang diterima dari pelanggan; piutang bunga; dividen dari investasi; dana yang dikembalikan oleh pemasok
 - b. Arus kas keluar adalah kas yang dibayarkan untuk pembelian barang untuk dijual kembali; kewajiban bunga; pajak penghasilan; gaji dan upah.
 Selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar disebut arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi.
2. Aktivitas Investasi (*Investing Activities*) adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Berikut ini jenis arus kas yang termasuk dalam kegiatan investasi:

- a. Arus kas masuk atau kas yang diterima dari pelepasan atau penjualan aktiva; pelepasan atau penjualan sekuritas investasi; penerimaan pinjaman (tidak termasuk bunga keuangan karena masuk dalam kegiatan operasi)
- b. Arus kas keluar atau kas yang dibayar untuk perolehan atau pembelian aktiva; investasi jangka panjang dalam hutang sekuritas ekuitas; pinjaman kepada pihak lain (tidak termasuk bunga karena masuk dalam kegiatan operasi); perolehan aktiva lainnya yang digunakan dalam produksi seperti paten atau aktiva tak berwujud lainnya (tidak termasuk persediaan, karena masuk dalam kegiatan operasi).

Selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar disebut arus kas masuk (keluar) bersih dari kegiatan investasi.

3. Aktivitas Pendanaan (Financing Activities) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah atau komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas yang biasanya masuk dalam klasifikasi aktivitas pendanaan adalah:
 - a. Arus kas masuk atau yang diterima dari pemilikan dari penerbitan sekuritas ekuitas; kreditor dari penerbitan sekuritas hutang
 - b. Arus kas keluar atau yang dibayarkan kepada pemilik untuk dividen dan distribusi lainnya; pemilik untuk penarikan saham atau pembelian saham treasury; kreditor untuk pembayaran kembali sejumlah pinjaman (tidak termasuk bunga masuk dalam kegiatan operasi).

Metode Penyusunan Laporan Arus Kas

Menurut Darsono (2005), terdapat dua metode dalam penyusunan laporan arus kas, antara lain:

1. Metode Langsung (Direct Method)

Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap (gross), tanpa melihat laporan laba atau rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.
2. Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Dalam metode ini penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. Dalam metode tidak langsung arus kas bersih diperoleh dari aktifitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh:

 - a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan.
 - b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi konsolidasi.
 - c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Analisis Laporan Arus Kas

Menurut Darsono (2005), salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini menggunakan komponen dalam laporan arus kas, komponen neraca dan laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio. Adapun rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas operasi dengan kewajiban lancar.
2. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya (bunga, pajak, dividen preferen). Rasio yang besar

menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dalam menutup komitmen yang jatuh tempo dalam satu tahun.

3. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil.

4. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rasio ini diperoleh dengan arus kas operasi ditambah dividen kas dibagi hutang lancar. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutupi kewajiban lancar.

5. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi pula dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal.

6. Rasio Total Hutang (TH)

Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasional perusahaan.

7. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa mendatang dengan menggunakan arus kas operasi.

Definisi dan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data, yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut (Sanger, 2015). Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Karena itu untuk menganalisis kinerja keuangan diperlukan tahap-tahap menganalisis.

Menurut Irham Fahmi (2012) ada 5 tahap untuk menganalisis kinerja keuangan yaitu:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
2. Melakukan perhitungan
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
4. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) (Fahmi.2013:2) dalam (Stie & Gama, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan (deskriptif) tentang laporan arus kas dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya dari laporan arus kas tersebut dianalisis berdasarkan rasio arus kas untuk mengetahui kinerja RSUD di Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang diperlukan dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi neraca dan laporan arus kas dan data primer yang meliputi informasi data melalui internet dan jurnal-jurnal.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio arus kas. Beberapa rasio yang digunakan dalam menghitung rasio arus kas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

Rumus yang digunakan:

$$AKO = \frac{\text{Jumlah Arus Kas Operasi}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Keterangan:

AKO = Arus Kas Operasi

Jika $AKO > 1$ = Baik

Jika $AKO < 1$ = Tidak Baik

2. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)

Rumus yang digunakan:

$$CAD = \frac{EBIT}{\text{Bunga} + \text{Hutang Pajak} + \text{Dividen Preferen}}$$

Keterangan:

CAD = Cakupan Arus Dana

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak (Earning Before Interest and Tax)

Jika $CAD > 1$ = Baik

Jika $CAD < 1$ = Tidak Baik

3. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Rumus yang digunakan:

$$CKB = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Bunga} + \text{Pajak}}{\text{Bunga}}$$

Keterangan:

CKB = Cakupan Kas terhadap Bunga

Jika $CKB > 1$ = Baik

Jika $CKB < 1$ = Tidak Baik

4. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Rumus yang digunakan:

$$CKHL = \frac{\text{Arus Kas Operasi} + \text{Dividen Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Keterangan:

CKHL = Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar

Jika $CKHL > 1$ = Baik

Jika $CKHL < 1$ = Tidak Baik

5. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Rumus yang digunakan:

$$PM = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Pengeluaran Modal}}$$

Keterangan:

PM = Pengeluaran Modal

Jika $PM > 1$ = BaikJika $PM < 1$ = Tidak Baik

6. Rasio Total Hutang (TH)

Rumus yang digunakan:

$$TH = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Total Hutang}}$$

Keterangan:

TH = Total Hutang

Jika $TH > 1$ = BaikJika $TH < 1$ = Tidak Baik

7. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)

Rumus yang digunakan:

$$AKBB = \frac{LB + BG + DP + SW + LS + DV - PM}{BG + SW + \text{Ht. Jangka Panjang} + \text{Hutang Leasing}}$$

Keterangan:

AKBB = Arus Kas Bersih Bebas, arus kas yang digunakan untuk membayar kewajiban

LB = Laba Bersih

BG = Bunga

DP = Depresiasi

SW = Sewa

LS = Leasing

DV = Dividen

PM = Pengeluaran Modal

100% - AKBB = Arus kas yang bebas digunakan untuk investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua data Laporan keuangan yang diperoleh oleh peneliti, hanya satu rumah sakit yang memiliki komponen data sesuai kriteria yang diperlukan. Rumah Sakit tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rabain. Laporan Keuangan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit berupa Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan laporan Arus Kas. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah lainnya, hanya memberikan data Laporan Operasional dan Laporan Neraca. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis rasio arus kas. Beberapa rasio yang digunakan dalam menghitung rasio arus kas kemudian peneliti menganalisis hasil rasio tersebut dan kemudian mendeskripsikan hasil rasio tersebut.

Berikut adalah data Rumah Sakit Umum Daerah yang didapat dapat dilihat di tabel:

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Tabel 1.1
Daftar Rumah Sakit yang dapat diteliti
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kode	Nama Rumah Sakit	Jenis	Tipe	Alamat
1	1602000001	RSU Kayuagung	RSU	C	Jl. Letnan Marzuki Kayu Agung
2	1603000001	RSU Prabumulih	RSU	C	Jl. AK Gani No. 41 Prabumulih
3	1603000002	RS Pertamina Prabumulih	RS		Jl. Kesehatan Prabumulih
4	1603000003	RS PT Taba Bukit Asam	RS		Jl. Raya Bukit Asam Tg Enim
5	1603000004	RSU Muara Enim	RSU	C	Jl. Lematang No.84 Muara Enim
6	1605000001	RSU Lubuk Linggau	RSU	C	Jl. Kesehatan Lubuk Linggau
7	1605000002	RS Siti Aisyah	RS		Tabapingin Lubuk Linggau
8	1606000001	RSU Sekayu	RSU	D	Jl. Dr Selamat 241 Sekayu Jl. Kol. H. Burlian km 6
9	1672000006	RS Jiwa Palembang	RS	A	Palembang
10		RS Rabain	RSU		Muara Enim
11	1672000007	RS Kusta Sungai Kundur	RS		Pos Mariana 30763 Palembang

Rasio yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Arus Kas Operasi (AKO)

Tabel 1.2
Rasio Arus Kas (AKO) RSUD

Tahun	2015	2016
AKO	0,894230409	0,143765803
Arus Kas Operasi	Rp 26.018.097.051	Rp 13.556.594.475
Kewajiban Lancar	Rp 29.095.518.099	Rp 94.296.377.616

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Berdasarkan tabel 1.2 rasio arus kas operasi untuk tahun 2015 dan 2016 kurang dari 1 sehingga dikatakan kinerja RSUD tidak baik. Hal tersebut dilihat dari rasio arus kas operasi (AKO) tahun 2015 sebesar 0,894230409 dan di tahun 2016 sebesar 0,143765803.

2. Rasio Cakupan Arus Dana (CAD)

Tabel 1.3
Cakupan Arus Dana (CAD) RSUD

Tahun	2015	2016
CAD	-2,351294197	-0,448475341
Bunga	Rp -	Rp -
Hutang	Rp 29.095.518.099	Rp 94.296.377.616
Dividen Preferen	Rp -	Rp -
EBIT	-Rp 68.412.122.873	-Rp 42.289.600.122

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Dalam laporan keuangan RSUD ternyata tidak ada akun bunga dan dividen preferen. Hal ini disebabkan oleh entitas RSUD merupakan salah satu entitas publik. Sektor publik disini menggunakan akun-akun yang ada dalam standar pelaporan pemerintah. Hasil tabel 1.3 dapat dilihat Cakupan Arus Dana (CAD) RSUD tahun 2015 sebesar (-2,351294197), dan untuk tahun 2016 sebesar (-0,448475341). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Cakupan Arus

Dana (CAD) RSUD masih tidak baik, karena nilai nya berdasarkan masih kurang dari 1. Tetapi terjadi peningkatan CAD dari tahun 2015 ke tahun 2016.

3. Rasio Cakupan Kas terhadap Bunga (CKB)

Tabel 1.4
Cakupan Kas terhadap Bunga

Tahun	2015	2016
CKB	-	-
Arus Kas Operasi	Rp 26.018.097.051	Rp 13.556.594.475
Bunga	Rp -	Rp -
Pajak	Rp -	Rp -

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Untuk rasio Cakupan Kas terhadap Bunga di tabel 1.4 dapat dikatakan gagal untuk dihitung. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya akun pajak dan bunga dalam laporan keuangan yang disajikan oleh RSUD.

4. Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL)

Tabel 1.5
Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar

Tahun	2015	2016
CKHL	0,894230409	0,143765803
Arus Kas Operasi	Rp 26.018.097.051	Rp 13.556.594.475
Dividen Kas	Rp -	Rp -
Hutang Lancar	Rp 29.095.518.099	Rp 94.296.377.616

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Dari tabel 1.5 tentang Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar (CKHL) di tahun 2015 dan 2016 sama-sama kurang dari 1. Yaitu, di tahun 2015 sebesar 0,894230409 dan tahun 2016 sebesar 0,143765803. Sehingga dikatakan kinerja RSUD dilihat dari Rasio Cakupan Kas terhadap Hutang Lancar ini tidak baik.

5. Rasio Pengeluaran Modal (PM)

Tabel 1.6
Rasio Pengeluaran Modal

Tahun	2015	2016
PM	1,900754677	0,390829348
Arus Kas Operasi	Rp 26.018.097.051	Rp 13.556.594.475
Pengeluaran Modal	Rp 13.688.298.318	Rp 34.686.736.156

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Hasil dari tabel 1.6 tentang Rasio Pengeluaran Modal untuk tahun 2015 bisa dikategorikan baik dengan rasio lebih dari 1, yakni 1,900754677, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan drastis menjadi tidak baik karena kurang dari 1, yakni sebesar 0,390829348. Rasio Total Hutang (TH)

Tabel 1.7
Rasio Total Hutang

Tahun	2015	2016
TH	0,894230409	0,143765803
Arus Kas Operasi	Rp 26.018.097.051	Rp 13.556.594.475
Total Hutang	Rp 29.095.518.099	Rp 94.296.377.616

Sumber : Hasil Pengolahan Data Peneliti

Berdasarkan tabel 1.7 tentang Rasio Total Hutang dapat dilihat rasio tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 0,894230409 dan 0,143765803. Karena rasio nya kurang dari 1, maka dinyatakan kinerjanya tidak baik.

6. Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB)

Untuk Rasio Arus Kas Bersih Bebas, arus kas yang digunakan untuk membayar kewajiban tidak dapat dihitung, dikarenakan tidak ditemukannya akun yang diperlukan dalam laporan keuangan RSUD.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diolah menggunakan Rasio Arus Kas ini menunjukkan bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Selatan tidak baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis Rasio Arus Kas yang rata-rata >1 . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Rasio Arus Kas merupakan metode pengukuran kinerja yang tidak baik digunakan. Karena Analisis Rasio Arus Kas banyak menggunakan data kewajiban dan ekuitas, sedangkan di Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak menampilkan data tersebut.

REFERENSI

- Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Andi: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Laporan Arus Kas.
- Irham Fahmi. 2012. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Jooste, Leonie. 2006. Cash Flow Ratio as a Yardstick for Evaluating Financial Performance in African Businesses. <http://ro.uow.edu.au>. Diakses pada tanggal 25 April 2017.
- Kaunang, James Marcel. 2013. Analisis Laporan Arus Kas sebagai Alat Ukur Menilai Kinerja Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 April 2017.
- Mukhtarom, Akhmad Edi dkk. 2015. Analisis Laporan Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia KOKEDA Kabupaten Tegal. <http://portalgaruda.org>. Diakses pada tanggal 24 April 2017.
- Dinas Kesehatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018.
- Sanger, Heiby dkk. 2015. Analisis Informasi Laporan Arus Kas sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan pada PT. Gudang Garam Tbk. sebagai Salah Satu Perusahaan Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <http://portalgaruda.org>. Diakses pada tanggal 24 April 2017.
- Stice, Earl K, James D Stice dan Fred Skousen, 2009. Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemahan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat.
- Subani Stie dan W. Gama. 2015. Analisis Arus Kas untuk Mengukur Kinerja Keuangan (Studi Pada KUD Sido Makmur Lumajang).

Warren, Carl, S., James M. Reeve, Philips E. Fess. 2006. Pengantar Akuntansi, Edisi 21, Cetakan 1, Buku 1, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani., dan Taufik Hendrawan, Salemba Empat, Jakarta.



PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

Siti Nur Faizah
 Vidya Vitta Adhivinna

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas PGRI Yogyakarta
 sitinurfaizahcute@gmail.com
 adhivinna@upy.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze and obtain empirical evidence about the effects of Return On Asset (ROA), leverage, institutional ownership and firm size to tax avoidance. The independent variables use are Return On Asset (ROA), leverage, institutional ownership and firm size. The dependent variable is tax avoidance. The research population was manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2011-2015 period. Sample was collected by purposive sampling method. With total 56 manufacturing companies were taken as sample.

This Research use multiple regression as analysis method. The result of this research showed that Return On Asset (ROA) has an effect on tax avoidance with a significance value of 0,000, leverage has no effect on tax avoidance with a significance value of 0,292, institutional ownership has no effect on tax avoidance with a significance value of 0,224 and firm size has no effect on tax avoidance with a significance value of 0,065.

INFO ARTIKEL

Diterima: 26 November 2017
 Direview: 27 November 2017
 Disetujui: 21 Desember 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Return On Asset, Leverage, institutional ownership, Firm Size, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam.

Menurut Darmawan & Sukarta, negara-negara berkembang khususnya Indonesia, pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (2014). Banyaknya perusahaan selaku wajib pajak badan yang beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan sendiri untuk pemerintah dalam perolehan pajak. Menurut Mayangsari (2015) kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara jika perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu.

Berkaitan dengan pembayaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi

laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) perbedaan yang terjadi menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal.

Pohan (2011) menyatakan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) adalah Return On asset (ROA). Menurut Kurniasih & Sari (2013) ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Selain ROA, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak (tax avoidance) adalah leverage. Leverage merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) penghindaran pajak (tax avoidance) memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan dapat memberikan peran bagi institusi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan.

Faktor lain yang menjadi penentu terjadinya penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dll (Hormati, 2009). Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Terdapat dua fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (reguler). Fungsi penerimaan (budgeter) merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur (reguler) merupakan fungsi pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Suandy (2008) dalam manajemen pajak terdapat beberapa fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, yang nantinya perusahaan dapat memilih tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Ngadiman & Puspitasari (2014) mengungkapkan, strategi perencanaan pajak (tax planning) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu cara mengurangi pembayaran pajak secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.

Return On Asset (ROA)

Sartono (2011) mengungkapkan rasio rentabilitas/profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Return On Asset (ROA) merupakan cara yang digunakan untuk menghitung profitabilitas. ROA merupakan teknik analisis yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan, sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Berdasar hal tersebut maka hipotesis pertama sebagai berikut.

H1: Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Leverage

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. Leverage menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Penambahan hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

H2: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan yang go public dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan saham perorangan, kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. Menurut Pohan (2009) kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan kepemilikan saham diatas 5%) namun tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institusional menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Ukuran Perusahaan

Hormati (2009) mengungkapkan ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total aktiva, log size, nilai pasar saham. Menurut Kurniasih & Sari (2013) ukuran perusahaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (medium firm) dan perusahaan kecil (small firm).

Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengungkapkan penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan dengan aset yang besar menggambarkan

bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penentuan Subjek

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 148 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan dengan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 56 perusahaan.

Variabel Dependen

Penghindaran pajak/tax avoidance adalah usaha perusahaan untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan undang-undang. Model estimasi pengukuran penghindaran pajak/tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan sesuai dengan Ngadiman dan Christiany (2014). CETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Data dari Cash Tax Paid didapat dari jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan untuk Pre-tax Income didapat dari Laba sebelum pajak yang tertera dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Variabel Independen

a. Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai dengan Waluyo, dkk. (2015). ROA diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Leverage

Leverage yaitu penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari kreditor untuk membiayai operasional dan aktiva perusahaan yang diukur menggunakan debt to equity ratio (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Leverage diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase saham yang dimiliki institusi dan menggunakan blockholders yaitu kepemilikan individu diatas 5% yang tidak termasuk kedalam kepemilikan manajerial sesuai dengan yang tercantum pada Waluyo, dkk., (2015). kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham institusi} + \text{Blockholder}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total asset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total asset. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai asal yang sebenarnya. Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (\text{Total Asset})$$

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dari situs resmi perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode purposive sampling. Berdasarkan hasil seleksi sampel, terdapat 56 perusahaan manufaktur yang dapat dijadikan sampel, dengan data observasi sebanyak 280. Berikut tabel kriteria pemilihan sampel dan perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	148
2	perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan	(28)
3	perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang asing	(27)
4	perusahaan manufaktur dengan nilai laba negatif	(37)
Total sampel penelitian		56
Total Pengamatan (56x5)		280

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

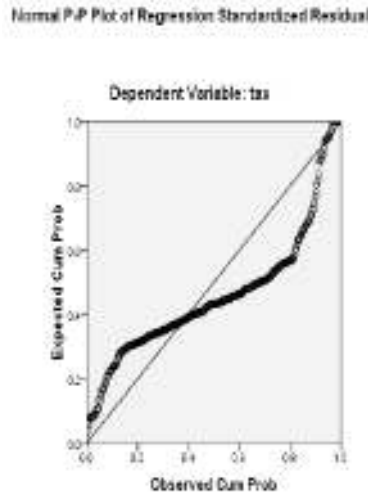
Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	280	0,00	0,99	0,1213	0,11763
Leverage	280	0,00	7,39	0,8469	0,96128
Kepemilikan Institusional	280	0,32	7,26	0,7823	0,54845
Ukuran Perusahaan	280	11,49	19,32	14,4132	1,71861
Tax Avoidance	280	0,06	0,93	0,2783	0,13101
Valid N (listwise)	280				

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Kolinieritas Statistik	
	Tolerance	VIF
Konstan		
ROA	0,948	1,055
Leverage	0,968	1,034
Kepemilikan Institusional	0,988	1,012
Ukuran Perusahaan	0,963	1,038

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh data bahwa masing masing variabel memiliki nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji autokorelasi

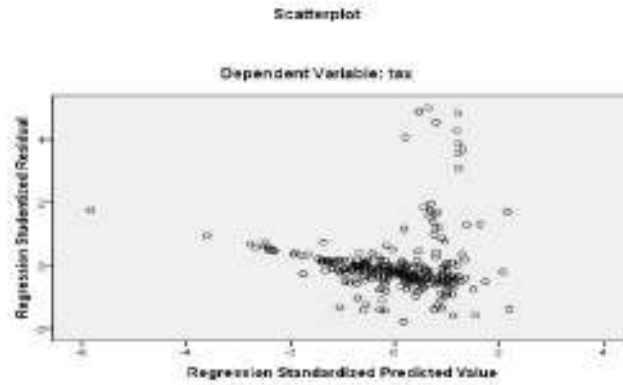
Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin Watson
1	0,282	0,079	0,066	0,12662	0,852

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,852. Nilai DW yang berada diantara -2 dan +2 menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak dan berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig	Tolerance	VIF
Konstan	0,434	6,485	0,000		
ROA	-0,240	-3,631	0,000	0,948	1,055
Leverage	0,008	1,057	0,292	0,968	1,034
INST	-0,017	-1,219	0,224	0,988	1,012
Size	-0,008	-1,853	0,065	0,963	1,038
Adjust R Square = 0,066			F Ratio = 5,922		
			Probabilitas= 0,000		

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2017

a. Uji statistik F

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji F menghasilkan nilai F ratio sebesar 5,922 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA), Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.

b. Uji t

Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji statistik SPSS 16 menunjukkan nilai signifikansi Return On Asset (ROA) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,240 sehingga H1 dalam penelitian ini terdukung. Hal tersebut berarti bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Nilai Koefisien Regresi pada variabel Return On Asset (ROA) sebesar -0,240. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang mengalami kenaikan variabel Return On Asset (ROA) menurunkan tindakan praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Adanya pengaruh pada penelitian ini menunjukkan bahwa besar atau kecil laba bersih yang dihasilkan dan aset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Damayanti & Susanto (2015) yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap tax avoidance.

Return On Asset (ROA) mencerminkan performa keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset perusahaan. Pengelolaan aset yang baik memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan adanya insentif pajak bagi perusahaan. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji statistik SPSS 16 menunjukkan nilai signifikansi leverage sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,008 sehingga H2 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hal tersebut berarti bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Nilai koefisien regresi pada variabel leverage sebesar 0,008. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel leverage meningkatkan praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman & Christiany (2014) dan Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berakibat pada munculnya beban bunga oleh perusahaan. Beban bunga yang muncul digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi penggunaan utang dari pihak eksternal perusahaan maka semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji statistik SPSS 16 menunjukkan nilai signifikansi kepemilikan institusional sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,017 sehingga H3 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hal tersebut berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Nilai koefisien regresi pada variabel kepemilikan institusional sebesar -0,017. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan menurunkan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Jati (2014) dan Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain, seperti investor luar negeri, pemerintah, perusahaan asuransi, bank dan lembaga-lembaga lainnya. Adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi memberikan peran bagi investor untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. Menurut Pohan (2009) tingginya kepemilikan saham institusi cenderung akan mengurangi praktik penghindaran pajak (tax avoidance), dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk patuh terhadap pajak.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji statistik SPSS 16 menunjukkan nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,065 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar -0,008 sehingga H4 dalam penelitian ini tidak terdukung. Hal tersebut berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2015. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar $-0,008$. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ukuran perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan selaku wajib pajak badan. Besar kecilnya suatu perusahaan akan dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan aset lebih kecil, sehingga perusahaan dengan aset yang tinggi lebih mampu dalam mengelola dan membayar kewajiban pajaknya. Menurut Dewi & Jati (2014) perusahaan dengan skala besar akan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah, sehingga sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil uji statistik SPSS 16 menunjukkan nilai signifikansi Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ dengan nilai F sebesar $5,922$ sehingga H_5 dalam penelitian ini terdukung. Hal tersebut berarti bahwa Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Kurniasih & Sari (2013) dan Ngadiman & Christiany (2014) yang menyatakan Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Selain itu, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat menimbulkan bias, antara lain:

1. Variabel independen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA), leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.
2. Penghindaran pajak (tax avoidance) pada penelitian ini diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR).
3. Variabel independen leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER).
4. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan memasukkan beberapa hal, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang terkait yang belum terdapat dalam penelitian ini.
2. Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) dapat menggunakan proksi yang lain.

Penelitian disarankan menggunakan perusahaan dari sektor lain atau menggunakan semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

REFERENSI

- Dewi, Ni Nyoman K. & Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaandan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556.
- Damayanti, F. & Susanto, T. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 5. No. 2.
- Darmawan, I. G. H. & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556.
- Dewinta, I. A. R & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14. No. 3.
- Hormati, Asrudin. 2009. Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13. No. 2.
- Kurniasih, T & Sari, M. M. R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi Vol. 18. No. 1.
- Mayangsari, Veronica Ria. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ngadiman & Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. Jurnal Akuntansi Vol. XVIII. No. 03.
- Pohan, Hotman T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Vol. 4. No.2.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya. Terkini Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Reinaldo, Rusli. 2017. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. JOM Fekon Vol. 4. No. 1.
- Sartono, Agus. 2011. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, dkk. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Vol. XVII. www.idx.co.id



KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR

Ita Wulandari
Dr. Siti Musyarofah
Muhammad Asyim Asy'ari

Universitas Trunojoyo Madura
 itawulandari06@gmail.com
 s_rofah@yahoo.com
 asim.asyari@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to reveal the role conflict of village officials to village financial management. This research uses qualitative approach, with phenomenology method. Data collection methods used were unstructured interview, observation, and documentation study. As a sample in this research mentioned as "hitam putih" village.

This research concluded the existence of role conflict perceived by village apparatus so that the role of village apparatus that is not suitable in village financial management, such as; (1) planning in the "hitam putih"; (2) planning of "Apa Kata" Kepala Desa; (3) The ambiguity of the role felt by the Village Secretary; (4) Village Operator "as" a Village Treasurer, preparation of APBDesa by Operator; (5) The Village Head acts as the Village Treasurer; (6) administration of village "does not need" Village Treasurer, arrangement of administration performed by Village Operator; (7) The village head covers the errors of the Village Secretary by replacing his role; (8) the role of Village Operator "only as data input operator" just equate reporting with the initial budget without knowing real fund nominal; (9) Village Operator handling accountability report; (10) BPD is not fully functionalized, only as a signatories; (11) Village Head, feels "unnecessary" reporting to BPD.

INFO ARTIKEL

Diterima: 26 November 2017
 Direview: 27 November 2017
 Disetujui: 27 Desember 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Role Conflict, Village Apparatus, Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Organisasi publik seperti Pemerintahan desa tidak lepas dari pada konflik. Konflik itu ditimbulkan dari status peran perangkat desa hanya sekedar formalitas. Sesuai dengan penelitian Dachliyati (2016), yang menyimpulkan bahwa Musrenbang Desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat karena usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa dan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. Penelitian tersebut selaras dengan Cahyono (2005), yang mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan masyarakat ataupun Badan Permusyawaratan Desa, untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi

kepentingan dan dirasa dibutuhkan oleh desa tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, pembagian peran dalam Pemerintahan desa tidak sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada bagaimana konflik peran yang dirasakan dan dipahami oleh setiap perangkat desa serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban. Sebelum peneliti melakukan penelitian ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal untuk menentukan apakah desa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi konflik peran diantaranya, adanya dominasi peran oleh Kepala Desa terhadap peran Bendahara Desa serta Sekretaris Desanya dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini sangat menarik dengan menggunakan pendekatan fenomenologi karena setiap perangkat desa menyadari tentang terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa namun tetap menjalankan perannya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Abu-Abu Kabupaten Remang, tepatnya di Desa "Hitam Putih". Pemberian nama samaran tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya.

Alasan peneliti memilih desa tersebut untuk melakukan riset karena berdasarkan data yang dimuat dalam buku desa KKN UTM tahun 2016, desa "Hitam Putih" merupakan salah satu desa yang belum memiliki Balai Desa sehingga peran perangkat desa "Hitam Putih" tidak dilaksanakan setiap harinya. Keadaan tersebut menarik hati peneliti untuk mengetahui apakah hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu peneliti memiliki kedekatan historis, budaya dan sosial, serta peneliti telah kenal secara dekat dengan informan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data secara riil tentang bagaimana konflik peran yang terjadi diantara para informan dalam mengelola keuangan desa dan kesesuaian perannya dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

LANDASAN TEORI

Definisi peran menurut Soekanto (2009:212) adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Peran tersebut telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebuah peran tidak lepas dari terjadinya konflik ketika suatu interpretasi tidak sesuai dengan realitanya. Peran oleh Luthans (2005) didefinisikan sebagai suatu posisi atau kedudukan yang seringkali memunculkan konflik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. Definisi tentang peran oleh Luthans, selaras dengan Irzani dan Witjaksono (2014:268) mendefinisikan konflik peran sebagai suatu posisi atau pertentangan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai. Kemudian Rusdiana (2015:162), juga menjelaskan bahwa di dalam ruang lingkup organisasi, konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas serta tanggung jawab terhadap sikap, nilai, dan harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi, dimana menurut Kamayanti (2016:165) bahwa fenomenologi bukanlah studi tentang sebuah fenomena, tetapi studi tentang kesadaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan Informan dipilih berdasarkan keperluan peneliti. Hal terpenting dalam pemilihan informan ini peneliti memilih informan yang memiliki

pengalaman dalam hal mengelola keuangan desa yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara desa, Operator Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa tahapan diantaranya; Tahap pertama yaitu Intentional analysis (menggabungkan Noema dan Noesis). Dimana Noema (sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan) dalam penelitian ini adalah konflik peran perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian noesis (kesadaran secara mendalam) adalah pemaknaan konflik peran perangkat desa atas pengalamannya yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.

Tahap kedua yaitu epoche (Pengurangan makna untuk memahami pemaknaan atas pengalaman informan), Tahap ketiga, yaitu eidetic reduction, merupakan hasil dari proses pemaknaan. Kemudian tahap terakhir yaitu kesimpulan dimana peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan peneliti selama di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Peran Pada Tahap Perencanaan

1. Perencanaan Pembangunan Desa Belum Optimal

Tahap perencanaan merupakan langkah awal sebuah pembangunan bagi desa yang menginginkan suatu perubahan. Tahap perencanaan tersebut dimulai dari diadakannya musyawarah desa yang dinamakan Musrenbang desa. Pada Desa "Hitam Putih" pelaksanaan Musrenbang desa meskipun ada, namun tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang ada, artinya musyawarah tersebut hanya formalitas saja, berikut ungkapan kepala desa mengenai Musrenbang desa:

“Masalah musyawarah itu, kita itu (pada aturan tidak terlalu diterapkan dengan benar, mengikuti separuh-separuh). (Kalau diikuti betul maka rumit), karena di Musrenbang Desa itu saja sudah ada tahapan-tahapan tertentu, kalau tidak salah tiga tahapan. Dan setiap dusun itu berhak mengajukan, misalnya dana desa cukup hanya dibangun dua titik misalnya. Di sini kan ada 6 dusun, itu semacam setiap dusun diwajibkan untuk mengusulkan lalu disitu semacam dilomba artinya ya dusun mana yang lebih berhak untuk mendapat dana tersebut.”

Berdasarkan penuturan wawancara tersebut secara sadar bahwa Kepala Desa "Hitam Putih" menganggap bahwa proses musyawarah dalam hal pembangunan desanya tidak diterapkan dengan benar atau belum optimal. Kepala Desa menganggap bahwa peraturan saat ini masih rumit sehingga dalam Musrenbang desa pun hanya mengikuti separuh dari setiap aturannya. Dalam musyawarah tersebut Kepala Desa "Hitam Putih" dapat melakukan penampungan atas berbagai usulan pembangunan dari masing-masing Kepala Dusun. Meskipun dalam hal ini pemerintah Desa "Hitam Putih" masih meninjau kembali kegiatan mana yang mendesak untuk direalisasikan. Namun dalam hal ini segala keputusan kembali lagi pada tangan Kepala Desanya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan lanjutan dari kepala desa:

“Nanti di situ kan mereka bersaing yang terkuat, kata satunya ini lebih penting kata satunya juga begitu. Cuma kalau diikuti semua aturan itu jadi hubungan yang tidak baik kemasyarakat. Dibilang tidak baik itu jadi kecemburuan sosial. Akhirnya mengambil jalan pintas mengumpulkan tetua desa, untuk menentukan titik mana yang lebih kita utamakan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan suatu kesadaran mendalam (noesis) dari Bapak Benedict selaku Kades bahwa perencanaan pada akhirnya Kepala Desa juga yang menentukan. Pemahaman Kepala Desa menganggap bahwa perbuatannya tidak mengikuti keseluruhan aturan dianggapnya benar dengan alasan jika sepenuhnya mengikuti aturan akan menimbulkan hubungan yang tidak baik terhadap masyarakatnya karena dapat menyebabkan terjadinya suatu kecemburuan sosial. Kemudian selanjutnya Sekretaris desa juga menyepakati adanya peraturan yang dijalankan setengah-setengah, sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau di kediamannya

“Di sini ini desa, jadi aturan itu tidak terlalu ketat. Maksudnya yang penting datanya ada buat bukti laporan ya sudah, kalau diikuti semua rumit soalnya.”

Berdasarkan penuturan wawancara wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) oleh Bapak James. Bapak James selaku Sekretaris Desa menyadari bahwa di Desa tersebut,

pemerintah desa tidak perlu mengikuti keseluruhan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Sekretaris desa menganggap bahwa yang penting sudah terdapat data untuk pelaporan. Sama halnya dengan Kepala desa, Sekretaris desa juga menganggap jika mengikuti keseluruhan aturan perundang-undangan masih dianggap terlalu rumit.

Selain itu muncul kesadaran mendalam (noesis) oleh Kepala Desa disela-sela wawancara yang menyatakan bahwa:

“masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk mengerti tentang aturan yang sesungguhnya karena masyarakat desa kan pemikirannya masih terbelakang”.

Kesadaran yang muncul dari pernyataan Kepala Desa tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa di mana telah diatur bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mengacu pada pedoman atau aturan yang melandasinya. Selain itu perlunya untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang lebih berkembang dan maju. Jadi bukan hanya desanya saja yang maju, melainkan juga masyarakatnya dapat berkembang dan memiliki pola pikir untuk menjadikan desanya lebih maju lagi dari segi pembangunan.

Ketika proses perencanaan tidak mengikuti seluruh aturan maka peran-peran perangkat desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang terjadi tersebut dapat menimbulkan suatu konflik peran, ketika ada perbedaan antara harapan dan kenyataan atas peran yang dijalankannya. Meski menyadari adanya konflik peran yang terjadi para perangkat desanya, Kepala desa tetap membenarkan hal demikian dan menganggap terpilihnya kembali beliau pada masa jabatannya kini adalah sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat. Kepala Desa merasa jika masyarakat percaya bahwa dirinya sudah memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya.

2. Perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa

Mekanisme selanjutnya dalam Musrenbang desa yaitu penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan rapat Musrenbang desa. Sekretaris Desa berperan sebagai Koordinator yang memimpin jalannya rapat dan dibantu oleh perangkat desa lainnya, dan Kepala Desa berperan mengawasi jalannya rapat. Namun pada Desa "Hitam Putih" yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Kepala Desa mendominasi peran Sekretaris Desa, sesuai dengan ungkapan Kades mengenai proses usulan pada tahap perencanaan:

“Kalau secara aturan Kepala Desa itu ya cuma mengawasi, yang memilih itu ya kayak pejabat-pejabat desa, tapi rapat itu tidak jalan. Kalau mengikuti peraturan itu pas bertengkar karena semacam berebut. Kata yang satu harus dusun saya, kata satunya dusun saya. Kalau masalah perencanaan APBDesa itu kan pertama mengusulkan, masalah usulan itu tidak dibahas bersama kalau di sini.”.

Hasil wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) dari informan Bapak Benedict, menyatakan bahwa dalam pengusulan perencanaan tidak dibahas bersama dengan masyarakat desanya. Pemahaman Kepala Desa menganggap bahwa perencanaan APBDesa sudah dipasrahkan kepada kepala desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak James selaku Sekretaris desa di Desa "Hitam Putih" bahwa perencanaan berdasarkan dominasi kepala desa. Berikut Ungkapan Bapak James:

“Kalau ada rapat itu yang mengetuai ya kepala desa, saya cuma jadi perwakilan aja, cuma ikut-ikutan. Sebenarnya ya saya yang mengatur tapi saya tidak tau apa-apa dan gak enak sama pak kades kan lebih tua.”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) yang ditunjukkan oleh Bapak James selaku Sekretaris Desa. Dari hasil percakapannya tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa yang mengatur dan mengkoordinasikan rapat dalam perencanaan. Pemahaman yang timbul oleh Sekretaris Desa bahwa meski secara aturan seharusnya dilakukan oleh Sekretaris Desa, namun dikarenakan merasa dirinya tidak mengerti apa-apa tentang tugasnya, maka ketidaktahuan

tersebut menjadikan Kepala Desa lebih mudah untuk mengambil alih setiap peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sekretaris Desanya.

Hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya konflik peran yang dirasakan Sekretaris Desanya, di mana peran Sekretaris desa tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Rasa tertekan yang terbentuk dalam kesadaran Sekretaris Desa akibat perbedaan harapan dengan tuntutan peran yang dirasakannya merupakan suatu konflik peran.

3. Ambiguitas Peran Sekretaris Desa

Pada Desa "Hitam Putih", terjadi fenomena ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desa. Ketika terdapat suatu keadaan di mana individu memperoleh informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas tentang tanggung jawabnya maka hal tersebut yang dinamakan Ambiguitas peran. Keadaan demikian berdampak pada individu yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukannya.

Sekretaris desa yaitu Bapak James sering kali dianggap tidak mengerti apa-apa tentang perannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Benedict selaku Kepala Desa:

“Sekdesnya tidak tau apa-apa, orang sekdesnya agak bingung itu tidak tau apa-apa.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) dari Bapak Benedict. Bapak Benedict menilai bahwa Sekretaris desa yaitu Bapak James dianggap tidak mengerti apa-apa tentang peran dan tanggungjawab yang sedang dijalannya.

Namun hal tersebut menjadi sangat mengherankan ketika Bapak James tetap terpilih kembali menjadi Sekretaris Desa "Hitam Putih" pada periode saat ini. Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desanya tidak dipermasalahakan oleh Kepala Desa "Hitam Putih". Kepala Desa justru mencari cara lain untuk membantu menggantikan pekerjaannya. Salah satunya dengan melimpahkan tugas Sekretaris Desa pada orang kepercayaan. Hal tersebut dipaparkan dalam percakapannya sebagai berikut:

“Perannya sekdes Cuma Kaki Tangan Kades cuma ya ke timur ke barat, cuma kerjanya absen ke kecamatan, semua dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan, melaksanakan, tapi cuma sebatas mengetahui saja kalau perencanaan itu minta bantuan konsultan propinsi. Tidak semua dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan, melaksanakan, tapi cuma sebatas mengetahui saja kalau perencanaan itu yah *terseher saya minta bantuan konsultan propinsi, sekdesnya tidak ikut campur*”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat kesadaran mendalam (noesis) oleh Bapak Benedict. Bapak benedict menyatakan bahwa Sekretaris desa tidak jelas dalam menjalankan perannya. Kemudian pemahaman dari Bapak Benedict yang menyatakan bahwa masalah pembangunan di Desa nya Sekretaris Desa hanya sebatas mengetahui jika ada pengajuan dan pelaksanaan, namun tidak ikut campur dalam perencanaannya.

Pernyataan Kepala Desa tersebut seakan membiarkan ke-ambiguitasan peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desanya tetap terjadi. Ambiguitas peran menurut Luthans (2005) merupakan keadaan di mana seorang individu tidak benar-benar memahami situasi atau dalam istilah umum “tidak tahu apa yang harus dilakukan”. Luthans menjelaskan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi Ambiguitas peran diantaranya yaitu deskripsi kerja yang tidak jelas, perintah atasan yang tidak lengkap, dan kurangnya pengalaman.

Ketidaktelitian perannya tersebut juga telah diungkap secara terang-terangan oleh Sekretaris Desa "Hitam Putih" yaitu Bapak James. Di mana saat ditemui dikediaman istrinya beliau mengatakan:

“*Kalau rapat Musrenbang desa, sekdes cuma mendengarkan, yang mengatur (memimpin) rapat ya kepala desa, Sekdes cuma sebatas mendampingi saja.*”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat kesadaran mendalam (noesis) oleh Sekretaris Desa yang menganggap bahwa ketika proses Musrenbang desa Sekretaris Desa hanya mendengarkan prosesnya. Kemudian apa yang dipikirkan Bapak James yaitu mengakui bahwa dirinya hanya sekedar

menjadi pendamping Kepala desa saja saat Musrenbang desa dilaksanakan. Hal ini membuktikan jika Sekretaris desa belum mengerti secara pasti apa perannya dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidakhahaman Bapak James di sini dikarenakan tidak adanya komunikasi dan pembagian peran yang secara jelas dari Kepala desa.

4. Operator Desa “menjadi” Sekretaris Desa

Penganggaran adalah tahap pengelolaan keuangan desa yang tidak bisa lepas dari tahap perencanaan. Setelah melakukan perencanaan pembangunan, maka sangat penting menentukan nominal anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Rancangan APBDesa di desa "Hitam Putih" untuk tahun anggaran 2016 dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Benedict dengan Operator Desanya yaitu Bapak William. Sesuai dengan pernyataan Bapak Benedict sendiri bahwa urusan perencanaan dan penganggaran diputuskan sendiri oleh Kepala Desa.

“Yang menyusun APBDesa itu ya kita, sebenarnya urusannya Sekretaris Desa, tapi sudah tau Sekretarisnya seperti itu, gak ngerti apa-apa, ya kalau masalah dokumen itu saya pasrah ke Operator semua yang lebih mengerti.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Benedict di atas merupakan pemahaman obyektif (noema) bahwa penyusunan APBDesa di desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Operator Desanya sebagai pembuatan dokumen. Kemudian timbulnya pemikiran bahwa penyusunan APBDesa dikerjakan Kepala Desa adalah kurang mengertinya Sekretaris desanya dengan tugasnya. Sedangkan Operator Desa lebih mengerti tentang pembuatan dokumen-dokumen di desa. Maka dari itu pembuatan APBDesa dilakukan sendiri oleh Kepala Desa "Hitam Putih". Pernyataan tersebut juga sesuai dengan ungkapan Operator desa.

“Yang membuat APBDesa itu ya kita, saya membuat dokumennya disuruh Kepala Desa, yang menentukan anggaran ya Kepala Desanya saya cuma membuat dokumennya saja. Ya sebenarnya tugas Sekdes, saya disuruh Kades begitu.”

Berdasarkan pernyataan Bapak William merupakan pemahaman obyektif (noema) yang mengakui jika pembuatan dokumen APBDesa dikerjakan olehnya dan Kepala Desa yang menentukan anggaran. Kesadaran mendalam yang dirasakan oleh Operator Desa bahwa hal tersebut seharusnya merupakan tugas Sekretaris Desanya namun beliau tidak bisa menolak perintah Kepala Desa. Jika ditinjau dari peraturan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Sekretaris Desa adalah melakukan penyusunan Rancangan APBDesa. Pelimpahan tugas terhadap Operator desa menyebabkan tidak berfungsinya peran Sekretaris Desa. Pelimpahan tugas tersebut dapat menciptakan konflik peran pada Operator Desa. Di mana Operator Desa merasakan tekanan atas tugas yang berlebihan namun tidak dapat menolaknya.

Kepala Desa menjelaskan mengenai nominal-nominal penganggaran dalam APBDesa yang dikelolanya. Menurut beliau angka tersebut diperkirakan dari jumlah APBDesa tahun sebelumnya. Kemudian beliau memperkirakan angka berapa yang akan diperoleh tahun ini. Rencana Pembangunan kemudian diperkirakan tentang sejumlah dana yang akan dihabiskan. Berikut ungkapan Bapak Benedict:

“Pertama-tama kita memperkirakan dana tahun ini akan cair berapa. Terus pas dirapatkan tentang titik mana saja yang akan dibangun, setelah memilih titik pembangunan, kalau masalah perkiraan uang itu urusannya saya, karena yang namanya uang kalau dirembukkan takutnya jadi pertengkaran, jadi ya sudah pasrah sama saya.”

Dari penjelasan wawancara tersebut terdapat pemahaman dari Bapak Benedict bahwa penganggaran dikelola sendiri olehnya. Hal tersebut membentuk kesadaran mendalam (noesis) bahwa Kepala Desa mengelola sendiri penganggaran di Desanya karena menganggap jika hal-hal yang bersifat material jika dimusyawarahkan akan menimbulkan konflik. Pendapat Kepala Desa tersebut berbeda dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang memaparkan bahwa di dalam perannya Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dibantu oleh PTPKD.

Konflik Peran Pada Tahap Pelaksanaan Dan Penatausahaan

1. Kepala Desa "Berperan sebagai" Bendahara Desa

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan desa. Setiap pengeluaran di desa seharusnya dikelola oleh Bendahara desanya. Sesuai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana setiap penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa merupakan tugas Bendahara. Berikut ungkapan Kades mengenai hal tersebut:

“Kalau secara aturan uang itu masuk ke bendahara, dana ini kan banyak ada dana ADD, dana desa, ada dari bangkalan, ada dari propinsi, banyak beragam. Kalau dana desa sepertamanya masuk ke bendahara, kita membuat adanya pencairan. Baru pas melakukan pencairan, uangnya masuk ke bendahara tapi yang mengelola tetap saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala desa. Beliau secara sadar mengakui bahwa bendahara hanya tempat masuknya pencairan dana pertama kali namun kemudian pengelolaannya dikelola oleh kepala desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bendahara Desanya, berikut pernyataan dari Bendahara Desa "Hitam Putih":

“Di sini itu berbeda dengan di Surabaya gak mengikuti kesemua aturan. Yah saya tidak terlalu mengerti tentang tata cara menjadi bendahara. Saya cuma disuruh sama dia (sambil melirik kades). Tapi kalau uang masuk ke rekening desa. Kalau ada pengeluaran itu ya minta ke Kepala Desanya semua. Kalau ada keperluan itu yang mengurus Kepala Desanya, saya tidak tahu apa-apa. Yang mencatat itu Operator desa, saya tidak ikut campur cuma disuruh tanda tangan. Sebenarnya saya tahu itu tugas saya tapi saya tidak tau apa-apa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari akan ketidaksi mengertiannya terhadap peran yang diembannya saat ini. Kemudian muncul pemahaman oleh Bendahara Desa bahwa ketidaksi mengertiannya menyebabkan pengelolaan keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa, sedangkan mengenai pencatatan dikerjakan oleh Operator Desanya.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perannya menjadi Bendahara Desa hanya sebatas formalitas. Keadaan tersebut memudahkan Kepala Desa dalam mendominasi peran Bendahara Desa. Pada Desa "Hitam Putih", Bendahara desa hanya memiliki wewenang untuk mencairkan dana saja, selebihnya masalah pengelolaan menjadi tanggungjawab Kepala desanya.

Dalam hal ini kepala desa menyadari bahwa dirinya yang mengelola setiap keuangan di desanya sedangkan Bendahara desa selaku istrinya hanya mencairkan uang saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Claudia sebagai berikut:

“Kalau pencairan itu ya saya suruh ngambil uangnya. Cuma ngambil saja tapi nanti yang mengatur ya dia (sambil melirik kades)”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) dari Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari dari pengalamannya selama ini hanya berperan dalam hal pencairan dana desa saja, namun setelah uang tersebut cair yang mengelola setiap pengeluaran adalah suaminya yaitu Kepala Desa "Hitam Putih".

2. Penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa

Penatausahaan merupakan tugas Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan. Namun Bendahara Desa pada desa "Hitam Putih" tidak mempunyai buku pencatatan apapun. Berikut ungkapan Ibu Claudia:

“Tidak pernah mencatat dek kan sudah ada operator desa, ya saya terserah Kepala Desa. Paling cuma disuruh tanda tangan ya saya tanda tangan”.

Berdasarkan wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa menyadari bahwa dirinya tidak pernah membuat pencatatan apapun. Pendapat

Ibu Claudia tersebut membentuk pemahaman bahwa menurutnya tidak perlu melakukan pencatatan karena sudah ada operator desa. Peran Bendahara Desa menurutnya hanya menandatangani saja jika diperlukan. Pada hal ini, pemahaman “Aku” oleh Ibu Claudia adalah “Aku tidak mencatat karena sudah ada operator desa sesuai dengan yang diinginkan kepala desanya, hanya ikut menandatangani saja jika diperlukan. Sedangkan untuk tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, Kepala desa meminta Operator Desa untuk mengambil alihnya. Namun terdapat sebuah harapan berbeda yang diungkap berdasarkan pernyataan dari Operator Desa yaitu Bapak William :

“Kalau ada pengeluaran, nanti kita memilih barang lalu memasukkan semuanya ke data. Yang menginput itu saya dengan tim. Timnya ada pendamping desa lagi. Kalau bendahara cuma paling bantuin lihat saja tapi tau data-datanya. Memang disuruh sama kepala desa saya yang input, ya sebenarnya bendahara, tapi ya nyuruh saya gitu soalnya tidak begitu mengerti bendaharanya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak William selaku Operator desa. Di mana Bapak William mengakui jika Bendahara tidak ikut membuat pelaporan dikarenakan kurang mengerti dengan perannya. Kemudian terdapat suatu pemikiran oleh Operator desa yang merasa bahwa untuk menutupi ketidakmengertian Bendahara Desa, Kepala Desa memberikan tugas tersebut kepada Operator Desa. Adanya harapan yang berbeda yang tidak sesuai dengan tuntutan peran yang dirasakan oleh Operator Desa "Hitam Putih" merupakan suatu Konflik Peran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Claudia sebagai berikut:

“Kalau masalah pencatatan itu ya operator semua. Saya dijadikan bendahara ini, saya gak mengerti. Kenyataannya susah dek jadi bendahara saya gak tahu. Saya Cuma disuruh pak kepala desanya. Kalau membuat SPJ itu ya dikerjain bersama-sama saya gak ikut campur”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) oleh Bendahara Desa bahwa pencatatan keuangan di Desanya dibuat oleh Operator Desa semua. Kemudian Ibu Claudia memahami bahwa selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari tentang ketidakmengertiannya menjabat sebagai Bendahara Desa karena beliau hanya diminta Kepala Desa untuk memegang jabatan tersebut. Ibu Claudia mengakui tentang susahnyanya memegang jabatan sebagai Bendahara Desa, karena beliau memang bukan ahli keuangan serta tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dibidang keuangan. Kemudian ketika terdapat suatu ketidakcocokan antara harapan dengan tuntutan suatu peran maka hal tersebut dinamakan sebagai konflik peran.

Konflik peran yang dirasakan Bapak William selaku operator desa terjadi ketika harus menanggung segala pencatatan yang seharusnya juga dikelola oleh Bendahara desa. Namun Bapak William tetap menjalankan perintah Kepala Desa karena merasa “sungkan”. Bagaimanapun posisinya dalam perangkat desa dipilih langsung oleh Kepala Desa. Begitupun Bendahara Desa merasa bahwa tugas tersebut bertentangan dengan nilai pribadinya yang kurang mengerti tentang peraturan serta perannya menjadi Bendahara Desa. Ibu Claudia semata-mata hanya mengikuti perintah Kepala Desa. Meski tidak diatur mengenai pemilihan perangkat desa oleh perundang-undangan, sebaiknya Pemerintah pusat juga membuat kebijakan untuk menghindari terjadinya konflik peran yang sedemikian rupa.

3. Kepala Desa Menutupi Kesalahan Sekretaris Desa

Suatu struktur dalam pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa beserta perangkat desa yang membantu pengelolaan di desa, diantaranya Sekretaris desa dan Bendahara desa. Bukanlah suatu hal yang baru bagi setiap pemerintahan desa diseluruh desa-desa kecil di Indonesia jika setiap pemerintah desa masih memiliki keterikatan keluarga. Hal tersebut karena Kepala desa berhak memilih sendiri anggota pejabat di desanya. Jika dalam suatu pemerintahan dikelola oleh satu keluarga maka hal yang mungkin jika konflik peran juga terjadi didalamnya. Salah satunya seperti yang diungkap oleh Kepala Desa "Hitam Putih" sebagai berikut:

“Kalau ada masalah dengan bendes dan sekdes kita saling menutupi (epoche)”

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran dari Bapak Benedict selaku Kepala desa, beliau secara sadar mengakui jika pernah terjadi beberapa masalah-masalah kecil yang sering terjadi di desanya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara lanjutan dari beliau:

“Misalnya dulu ada masalah sekdesnya menghabiskan uang untuk membuat surat-surat itu ya saya yang tanggung jawab, saya ganti uangnya suruh selesaikan ke weheb (kaki tangannya kades). Ya itu sudah berupa teguran secara halus ke sekdes, gak saya tegur langsung soalnya kan masih sodara ga enak. Kalau mangkel yang namanya manusia ya pasti, apalagi Sekdesnya ini memang begitu orangnya, saya sudah membayar hutangnya banyak sekali tapi ya itu dia gak sadar-sadar. Ya tapi saya tetap secara halus dan membiarkannya, ga enak soalnya saudara saya, kalau saudara kan memang harus saling menutupi.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan jika Bapak Benedict merasa bahwa menutupi kesalahan Bendahara Desa maupun Sekretaris desa sering dilakukan olehnya. Pendapat Bapak Benedict sebagai bentuk pemahaman obyektif (Noema), disebabkan oleh pengalamannya yang sering menghadapi permasalahan yang timbul akibat Sekretaris di desanya. Kemudian Kepala Desa membentuk pemahaman bahwa sudah menjadi kewajiban Kepala desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan di desanya. Penyelesaian yang dimaksud adalah dengan menutupinya dan menganggap itu bentuk dari sebuah teguran terhadap Sekretaris Desa. Padahal kasus tersebut melibatkan sejumlah uang yang seharusnya dikelola oleh Sekretaris desanya.

Konflik peran yang dirasakan Kepala desa terjadi ketika tuntutan peran yang terjadi atas Sekretaris desa tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Sikap kepala desa yang selalu menutupi kesalahan dari Sekretaris desa tersebut juga dapat dikatakan konflik peran karena melanggar nilai moral yang dimilikinya. Meskipun beliau menyadari tentang terjadinya konflik peran, namun Kepala Desa tetap menerima kondisi tersebut dengan alasan “tidak enak hati” pada Sekretaris Desanya. Hal ini dijadikan alasan oleh Kepala Desa untuk tidak melibatkan Sekretaris Desa dalam Tahap pelaksanaan pembangunan di desanya. Adanya pembagian tugas yang tidak jelas menyebabkan Kepala Desa lebih mudah mendominasi setiap tahap pelaksanaan di desanya.

Konflik Peran Pada Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

1. Peran Operator Desa Hanya "Tukang Input"

Operator desa merupakan bagian dari perangkat desa yang bertugas dalam hal pelaporan. Setiap dana yang didapatkan oleh pemerintah desa harus dilaporkan dan sesuai dengan pengajuan yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Oleh karena itu operator desa memiliki tugas utama dalam hal pelaporan di masing-masing desa. Namun fenomena yang terjadi Operator desa pada Desa "Hitam Putih" ini tidak memiliki latar belakang yang mengerti pencatatan laporan keuangan desa, namun beliau merupakan seorang guru SD yang dipilih langsung oleh Kepala desanya untuk menjabat sebagai Operator desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak William selaku Operator Desa "Hitam Putih":

“Operator itu perannya cuma nginput data seperti pengelolaan keuangan, sekarang kan ada aplikasi siskeudes (system keuangan desa), jadi semua pengeluaran di desa dimasukkan di sana, kalau masalah pembelian barangnya kepala desa yang atur ya mungkin (ragu-ragu), saya cuma tau nginput saja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Operator desa. Bapak William menyadari bahwa tugasnya hanya untuk membuat pelaporan pada setiap kegiatan di desanya. Beliau mengetahui tentang tugasnya untuk menginput setiap nota kegiatan yang diserahkan oleh kepala desa. Meski mengetahui hal tersebut namun gerak-gerik Bapak William seperti ragu-ragu dalam menjawab setiap pertanyaan peneliti dan sampai mengulang kembali pertanyaannya, bahkan ada beberapa istilah yang tidak diketahui Bapak William saat ditanyakan oleh peneliti. Kemudian ketika ditanya mengenai bagaimana pencatatan jika ada yang tidak sesuai aturan, berikut penjelasan beliau:

“Kalau sekarang dana desa itu semua dikelola oleh perangkat desa, pertama kita membuat anggaran APBDes untuk satu tahun, apa saja yang diperlukan oleh desa yang utama itu

pembangunan fisik seperti jalan, gedung, terus pengelolaannya uang itu turun ke bendahara desa kemudian dikelola oleh perangkat-perangkatnya. Kalau masalah pelaksanaan pembangunan itu dana dipas-paskan, gak ada lebihnya biar mudah mencatatnya. Karena *operator kurang tau tentang uang, dikasih nota di input aja udah.*”

Hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman oleh Bapak William selaku Informan. Berdasarkan pengalamannya Bapak William menyadari bahwa operator desa yang dijabatnya saat ini hanya berperan menginput data sebagai pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang terjadi di desanya dengan menyamakan antara anggaran awal dan pelaporan. Hal tersebut menimbulkan kesadaran mendalam (Noesis) bahwa keadaan uang yang sebenarnya pun Operator kurang mengetahui hanya menyamakan atau "dipas-paskan" setiap pengeluaran dengan anggaran awalnya agar lebih mudah melakukan pelaporan.

Konflik peran yang dirasakan Operator desa adalah ketika beliau berada dibawah tekanan Kepala Desa untuk menjalankan semua perintahnya. Adanya rasa "tidak enak" untuk menolak perintah Kepala Desa, namun dilain sisi hal yang dilakukannya dalam pelaporan adalah hal yang kurang benar. Hal tersebut sesuai ungkapan Bapak William selanjutnya.

“Sebenarnya ketika ada kelebihan dana ya itu perlu dilaporkan kembali, jadi biar gak ribet dipas-paskan saja. Sama Kadesnya juga disuruh begitu.”

Berdasarkan pernyataan diatas merupakan keadaan yang bertolak belakang antara apa yang terjadi di lapangan dengan harapannya atas peran yang dijalankannya. Berikut ungkapan Kepala desa mengenai peran Operator desanya:

“Ya pemerintah sendiri kan pelan-pelan yang mengadakan peraturan dipakai sedikit-sedikit. Sekarang setiap desa enak diadakan operator desa, ya data dipegang dia semua. Yang mengusulkan itu awalnya dari kita, masalah dokumen itu pemerintah kan sekarang menyediakan pendamping dari Kecamatan Abu-Abu. Kalau masalah operator desa itu harus desa sekitar. Yang menggarap dokumen ya operator desa kan memang tugasnya. Cuma kan masih tahap belajar ya jadi masih konsultasi ke pendamping”.

Hasil wawancara tersebut merupakan bentuk pemahaman dari Kepala desa. Bapak Benedict merasa bahwa penggarapan dokumen di desa merupakan peran Operator desa. Bapak Benedict menyadari jika operator desanya belum begitu menguasai pelaporan, dikarenakan peraturan pemerintahan berjalan perlahan dan masih tahap belajar.

2. LPJ dikerjakan Operator Desa

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang harus dibuat pada setiap desa per semester agar pengawasan dapat lebih baik. Jika ditinjau dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membuat Laporan pertanggungjawaban merupakan peran Sekretaris desa. Namun pada desa "Hitam Putih", Laporan pertanggungjawaban dikerjakan oleh Operator desa. Berikut ungkapan Kades mengenai hal ini:

“Kalau secara aturan ya LPJ itu dibuat Sekdes, tapi di sini dipasrahkan pada operator semua. kan sudah tau sekdesnya tidak mengerti apa-apa begitu.”

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan pemahaman obyektif (noema) oleh Bapak Benedict menyadari jika pembuatan Laporan Pertanggungjawaban di desanya dibuat oleh Operator Desa. Alasannya adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya jika Kepala Desa menilai Sekretarisnya tidak mengerti apa-apa tentang perannya. Berikut ungkapan Operator desa mengenai hal ini.

“Kalau LPJ saya yang membuatkan, memang disuruh sama kepala desa saya yang suruh input, ya sebenarnya sekdes, tapi ya nyuruh saya gitu soalnya tidak jelas sekdesnya.”

Hasil wawancara diatas merupakan kesadaran mendalam (noesis) oleh Operator Desa. Operator desa menyadari jika Laporan pertanggungjawaban dibuat olehnya. Alasannya karena perintah Kepala Desa sedangkan Sekretaris desanya dinilai tidak jelas. Pelimpahan peran tersebut membuat Sekretaris desa menjadi disfungsional, yang berdampak pada tidak mengertinya Sekretaris

desa dengan perannya. Namun pernyataan Operator desa berbeda dengan pernyataan Sekretaris desa, berikut pernyataan Sekretaris Desa:

“Kalau buat LPJ itu saya datang, nanti dibuat bersama-sama dengan Operator, ya dia yang membuat saya mendiktekan saja, kan yang lebih tau semua pencatatan operatornya.”

Berdasarkan pernyataan Sekretaris desa tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis), menjelaskan bahwa Sekretaris desa ikut hadir dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban. Meski Sekretaris desa tidak ikut membuatnya, beliau mengaku telah menjalankan perannya dengan mendiktekan apa saja yang perlu dilaporkan. Dalam pernyataannya Sekretaris desa juga mengakui jika Operator lebih mengerti mengenai semua pencatatan di desanya ketimbang dirinya. Ungkapan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dan Operator Desa yang menilai Sekretaris desanya tidak jelas dan tidak mengerti apa-apa tentang perannya.

Jika ditinjau apa yang terjadi pada Sekretaris desa adalah akibat adanya pembagian peran yang tidak jelas oleh pemimpinnya. Kepala Desa tidak memberikan peran yang sesuai, tujuannya adalah agar lebih mudah menjalankan pemerintahan di desa sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dirasakan Sekretaris desa merupakan konflik peran, atas berbedanya tuntutan peran dengan apa yang diharapkannya.

3. BPD “Tidak Difungsikan”, Hanya tukang “Tanda Tangan”

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang berperan dalam hal membahas dan menyepakati setiap kebijakan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Adanya BPD di setiap desa adalah untuk tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dalam hal ini BPD berperan mengawasi kinerja perangkat desanya. Namun fenomena yang terjadi pada Desa "Hitam Putih" yaitu BPD menjadi tidak begitu berfungsi, berikut pendapat Kepala desa:

“Peran BPD itu cuma semacam mengawasi. Kalau mengajukan apa-apa harus ada tanda tangan BPD. Mencairkan uang itu harus ada tanda tangan BPD. Kalau secara aturan setelah selesai memang perlu dilaporkan lagi pada BPD tapi kalau di disah ndak perlu leh cukup tau di awal sepenteng dana itu leh sesuai (epoche). Tapi di sini BPD nya tidak aktif, tidak ada kerjaan, ya cuma nerima gaji saja. karena di sini tidak ada kegiatan.”

Hasil wawancara tersebut merupakan bentuk pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala desa. Bapak Benedict merasa bahwa peran BPD hanya sebatas mengawasi tanpa perlu lagi melaporkan hasil kegiatan kepada BPD tersebut. Hal tersebut membentuk pemahaman dari Bapak Benedict bahwa BPD tidak aktif menjalankan perannya dikarenakan tidak adanya kegiatan. Keadaan tersebut kurang sesuai dengan asas transparan yang seharusnya terdapat dalam pengelolaan keuangan desa di mana dalam pengelolaan keuangan harus terdapat prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Jika BPD selaku Badan Pengawas desa saja tidak mengetahui laporan akhir pelaksanaan kegiatan apalagi dengan masyarakatnya.

Hal tersebut tidak dibantah oleh Bapak Sergio selaku Ketua BPD di Desa "Hitam Putih", berikut pernyataan beliau :

“Di sini BPD tidak ada kerjaan, tidak aktif di sini beda dengan di surabaya, karena tidak ada kegiatan. Pengawasan itu kalau kades ada kegiatan baru mengawasi, kalau kades ada kesalahan ya ditegur kan hak saya. Pelaksanaan itu dikerjakan perangkat yang lain, saya tidak ikut mengecek paling kalau selesai semua saya cuma diberikan tumpukan kertas suruh tanda tangan, terkadang stempel saja saya tidak pegang ada di kades (sambil ketawa).”

Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) dari Bapak Sergio selaku Ketua BPD, beliau menyadari bahwa jabatannya sebagai BPD tidak memiliki pekerjaan apapun atau tidak aktif. Kemudian hal tersebut membentuk kesadaran yang lebih mendalam bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan tugas perangkat desa lainnya tanpa perlu pengawasan dari BPD, dan BPD hanya berperan sebagai tukang "Tanda tangan" saja. Akibat dari tidak berfungsinya BPD pada desa tersebut merupakan suatu konflik peran. Hal tersebut juga dapat

menyebabkan tidak transparannya Kepala Desa terhadap masyarakat, dan masyarakat tidak mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

4. Kepala Desa "tidak perlu" lapor BPD

Laporan pertanggungjawaban merupakan output atas terlaksananya kegiatan pembangunan pada setiap desa. Asas transparansi diperlukan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban yang merupakan output atas terlaksananya kegiatan pembangunan pada setiap desa. Namun pada Desa "Hitam Putih" transparansi masih sangat rendah dilakukan berikut keterangan dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa:

"Kalau masalah LPJ itu kan di akhir tahun kita harus selesai, kalau mencatat bendahara itu gak setiap hari, cuma secara singkatnya bendahara itu hanya mengeluarkan uang sesuai kebutuhan, iya masalah catatan rincinya ada pada LPJ itu sudah lengkap itu."

Hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa. Bapak Benedict secara sadar menyatakan jika pencatatatan tidak perlu dilakukan setiap hari. Berikut penjelasan berikutnya,

"LPJ itu tidak terbuka ke masyarakat (noema), karena dari awal sudah tau mana yang akan dibangun ya sudah ada hasilnya kenapa mesti dikasih tau lagi. Kalau BPD ya mesti tau sendiri kan kalau ada apa-apa mesti ikut tanda tangan jadi ya tidak perlu ingin tahu karena sudah tau *di awal (noesis)*."

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) yang tampak dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa. Beliau menyadari bahwa LPJ tidak perlu terbuka ke masyarakat karena dari awal anggaran sudah disamakan dengan tahap pelaksanaannya dan BPD pun tidak perlu mempertanyakannya karena sudah mengetahui bagaimana jumlah anggaran dari awal. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahap transparansi pada asas pengelolaan keuangan. Sebagaimana telah tertuang dalam BPKP (2015) untuk perlu dilakukannya pertanggungjawaban terhadap BPD dan masyarakat. Peran BPD diharapkan mampu mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat efisien terutama bagi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal yang terjadi di atas, maka BPD juga dinilai tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya konflik peran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa adanya konflik peran yang dirasakan perangkat desa sehingga berpengaruh pada peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya; (1) perencanaan di desa "Hitam Putih" belum optimal; (2) perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa; (3) Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris desa akibat kurang adanya komunikasi dari Kepala Desa; (4) Operator Desa "menjadi" Bendahara Desa, penyusunan APBDesa dikerjakan Operator; (5) Kepala Desa berperan sebagai Bendahara Desa, dalam hal pengelolaan kas desa dikelola oleh Kepala Desa; (6) penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa, penyusunan penatausahaan dikerjakan Operator Desa; (7) Kepala desa menutupi kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; (8) peran Operator Desa "Hanya Tukang Input", tanpa tau nominal hanya menyamakan pelaporan dengan anggaran awal; (9) Laporan pertanggungjawaban dikerjakan Operator Desa akibat ketidaktahuan Sekretaris desa tentang perannya; (10) BPD tidak difungsikan, hanya tukang tanda tangan; (11) Kepala Desa, merasa "tidak perlu" adanya pelaporan pada BPD;

Salah satu kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti kesadaran informan dari segi peran tanpa terlibat langsung dalam proses Musrenbang desa yang dilaksanakan di Desa "Hitam Putih". Serta waktu penelitian yang terbatas dikarenakan kesibukan para informan menyebabkan peneliti perlu mencari celah-celah waktu ditengah kesibukannya.

Saran peneliti bagi Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah daerah melakukan pengawasan yang rutin terhadap pengelolaan keuangan desa. Bagi pemerintah Desa "Hitam Putih", disarankan untuk dapat memperbaiki sistem pengendalian internal Pemerintah Desa "Hitam Putih"

dengan cara melaksanakan tupoksi masing-masing perangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mempunyai asumsi bahwa di dalam konflik peran terdapat juga konflik kepentingan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti kembali mengenai adanya konflik kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Cahyono, Heru (Ed.). 2005. *Konflik Elit Politik Pedesaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dachliyati. 2016. *Mengungkap Fenomena Fraud atas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis Universitas Trunojoyo Madura.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Kualitatif Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta.
- Irzani, Dwi dan Witjaksono, D Andre. 2014. *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Keinginan Keluar Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA Di Surabaya*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
- Luthans, Fred. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rusdiana, A. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia



PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN AUDITOR INTERNAL TERHADAP AUDIT DELAY

Sisilia Novi Ratnasari
 Yennisa

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas PGRI Yogyakarta
 sisilianovi@yahoo.com
 yennisa.icha@upy.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of firm size, size of Public Accountant firm, and internal auditors to audit delay. The sample of this research for used 29 manufacture companies sector of consumer goods that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2012-2015. The hypothesis proposed were tested by multiple linier regressions models. The results of the research shows that firm size and internal auditors has influence to audit delay. While size of Public Accountant firms do not has influence to audit delay.

INFO ARTIKEL

Diterima: 26 November 2017
 Direview: 27 November 2017
 Disetujui: 27 Desember 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Firm Size, Size Of Public Accountant Firm, Internal Auditors, Audit Delay.

PENDAHULUAN

Perusahaan dapat dikatakan go public apabila telah menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan perusahaan dalam menerbitkan sahamnya yaitu untuk menambah dana modal bagi perusahaan untuk kegiatan operasional. Selain itu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar ikut serta dalam kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Berdasarkan tujuan penerbitan saham perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap publik atau masyarakat untuk setiap periodenya menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Elen P dan Anggraeni N. S (2012) menjelaskan nilai dari sebuah laporan keuangan perusahaan dapat diukur dari ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Jika auditor semakin lama dalam menyelesaikan proses auditnya maka informasi yang dihasilkan kemungkinan dapat diketahui oleh investor tertentu sebelum laporan keuangan diterbitkan ke publik. Selain itu dari sudut pandang pelaku pasar modal keterlambatan yang terjadi atas penyampaian informasi laporan keuangan akan menimbulkan pandangan negatif terhadap perusahaan.

Motivasi penelitian ini disebabkan karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yaitu Meylisa J. I dan Estralita T (2010) menunjukkan bahwa yang mempengaruhi audit delay adalah besarnya ukuran KAP, sedangkan ukuran perusahaan (total asset) tidak mempengaruhi. Peneliti lainnya seperti Zooana Farida P, dkk (2013) hasil dari pengujiannya menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh, namun ukuran perusahaan mampu mempengaruhi audit delay. Selain itu ada pun penelitian yang memiliki hasil berlawanan yaitu Lia Permatasari (2012) menyatakan hasil ukuran KAP, ukuran perusahaan tidak berpengaruh tetapi variabel auditor internal yang mampu mempengaruhi audit delay. Sedangkan dalam penelitian Sistya R (2008) ukuran perusahaan, ukuran KAP memiliki pengaruh atas audit delay, tetapi ada faktor yang tidak berpengaruh yaitu auditor

internal. Greta J dan Rutji S (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan

Menurut Andi Kartika (2011) laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan yang merupakan sumber dari informasi yang dapat menjelaskan keadaan keuangan dan non keuangan dari suatu perusahaan atau entitas. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat memberikan dasar dan pandangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan atau entitas. Laporan keuangan ini akan diaudit oleh auditor dan menghasilkan sebuah opini yang dikeluarkan oleh auditor independen sebagai penilaian terhadap kinerja manajemen.

Tanggung Jawab Pelaporan Laporan Keuangan

Kiki P. P dan Nur F.A (2015) menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang telah menerbitkan sahamnya di BEI akan diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Menurut peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan kemudian diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dikeluarkan.

Audit Delay

Andi Kartika (2011) menyatakan bahwa audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal tanggal diterbitkannya laporan audit. Ketepatan waktu untuk menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit ke publik merupakan hal yang sangat penting. Kiki P. P dan Nur F. A (2015) menjelaskan juga audit delay dapat sebagai tolak ukur untuk mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami masalah, selain itu juga dapat sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan suatu perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Menurut Andi Kartika (2011), ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya kekayaan atau total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kekayaan yang besar cenderung mendapat tekanan yang tinggi dari pihak eksternal perusahaan seperti investor, pengawas permodalan dari pemerintah terhadap kinerja manajemen perusahaan atas informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kekayaan sedikit. Greta J dan Rutji S (2012) memaparkan hal itu dapat menyebabkan ketatnya sistem manajemen mengenai pengendalian internal yang dimiliki perusahaan untuk mengawasi aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Ukuran KAP

Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik menjelaskan bahwa KAP merupakan usaha yang dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu KAP mendapatkan izin untuk melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) namun tetap wajib melaporkan secara tertulis tentang kerjasama yang dilakukan. Zooana Farida P, dkk (2013) menjelaskan bahwa kualitas suatu KAP mampu diukur dengan melihat ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses audit. Auditor yang

berasal dari KAP The Big Four hanya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dan dianggap mampu melaksanakan proses audit secara lebih efisien dikarenakan KAP The Big Four memiliki lebih banyak auditor yang profesional dan sistem informasi yang canggih.

Auditor Internal

Alvin A. Arens, dkk (2013) mendefinisikan bahwa auditor internal merupakan karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, hal ini yang menyebabkan auditor internal dikatakan kurang memiliki sifat independen karena auditor internal merupakan bagian karyawan atau staf yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Sukrisno Agoes (2013) menyatakan bahwa auditor internal adalah bagian terpenting dalam pengendalian internal dari suatu perusahaan. Tanggung jawab auditor internal sebagai penyedia informasi mengenai keefektifan suatu pengendalian internal dan prosedur kegiatan organisasinya serta menganalisis berbagai informasi yang dihasilkan dari berbagai bagian organisasi dari kegiatan usaha yang dijalankan. Hasil audit yang harus dikeluarkan oleh auditor internal berupa penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern beserta saran perbaikan.

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay

Andi Kartika (2011) menerangkan perusahaan berukuran besar cenderung lebih terdorong untuk segera untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. Penyebabnya adalah perusahaan besar lebih diawasi secara ketat oleh investor, pengawas permodalan serta pemerintah. Hal itu yang dapat memacu perusahaan besar agar dalam penyampaian laporan keuangan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang berukuran menengah atau kecil. Shinta W dan Budiarta (2016) para investor dan pemilik akan menjaga nama baik atau reputasi dari perusahaannya yaitu dengan cara memberikan pengawasan yang ketat dalam manajemen

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.

2. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay

Elen P dan Anggraeni N. S (2012) menyatakan besarnya ukuran KAP dapat digunakan sebagai indikator bahwa jasa audit yang diberikan memiliki kualitas yang tinggi. KAP berukuran besar memiliki sistem yang canggih dan akurat serta auditor yang bekerja lebih banyak dan profesional. Hal itu biasa ditemukan pada KAP yang bekerjasama dengan KAPA yaitu The Big Four karena ada nama baik yang dipertaruhkan untuk menjaga kualitas KAP. Selvia E.R dan Bambang S (2015) KAPA The Big Four mampu mengambil sikap dan pendapat yang tepat dan sesuai dengan dengan standar yang berlaku. Hal itu dikarenakan auditor yang bekerja memiliki tingkat kompetensi dan kemampuan yang lebih tinggi daripada KAP lokal.

H2: Ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay.

3. Pengaruh Auditor Internal terhadap Audit Delay

Sistya R (2008) menjelaskan bahwa auditor internal memiliki tugas dalam perusahaan yaitu memeriksa dan mengevaluasi ketersediaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara periodik. Perusahaan yang memiliki SPI yang baik akan dapat mengurangi prosedur audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yang nantinya akan mempercepat proses penyelesaian audit. Selain itu penelitian Hichen K dan Khaled S (2016) menunjukkan bahwa auditor internal yang termasuk dalam komite audit mampu mempengaruhi kualitas pengendalian internal suatu perusahaan. Komite audit dapat mengambil beberapa langkah proaktif secara tepat waktu terhadap kelemahan yang dimiliki perusahaan atas pengendalian internalnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pengendalian internal serta keterbukaan perusahaan.

H3: Auditor internal berpengaruh terhadap audit delay.

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi dengan periode penelitian dari tahun 2012-2015. Data dalam penelitian diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi	37
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada tanggal tutup buku 31 Desember untuk periode tahun 2012-2015 secara berturut-turut	1
3	Perusahaan yang melakukan <i>delisting</i> selama tahun periode 2012-2015	7
Jumlah sampel		29

Definisi Operasional

1. Variabel Dependen

Silvia A dan Wirakusuma (2013) audit delay diukur dengan menghitung jumlah selisih hari antara tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan perusahaan yaitu tanggal 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen.

Variabel Independen	Skala	Pengukuran
Ukuran Perusahaan	Rasio	$\log(\text{total asset})$
Ukuran KAP	Dummy	1= KAP bekerjasama dengan KAPA <i>The Big Four</i> 2= KAP yang tidak bekerjasama dengan KAPA <i>The Big Four</i>
Auditor Internal	Dummy	1= struktur organisasi memiliki pengungkapan auditor internal 0= struktur organisasi tidak memiliki pengungkapan auditor internal

Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini untuk memberikann penjelasan atau gambar mengenai karakteristik data penelitian seperti mean, standar deviasi dan sebagainya.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dilihat dari uji multikolonieriytas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi.

3. Regresi Linear Berganda

Hipotesis akan diuji dengan persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Audit Delay
- X₁ = Ukuran Perusahaan
- X₂ = Ukuran KAP
- X₃ = Auditor Internal
- a = Konstanta
- b₁, b₃ = Koefisien Regresi
- e = Error atau Keasalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
<i>Audit Delay</i>	116	37	162	77,45
Ukuran Perusahaan	116	10,67	13,96	12,33

Waktu minimum pelaksanaan proses audit yang dilaksanakan adalah 37 hari dan jangka waktu pelaksanaan yang paling lama yaitu 162 hari. Rata-rata audit delay yang dialami perusahaan yaitu selama 77 hari dengan standar deviasi 16,38 hari. Hal itu memberi penjelasan rata-rata audit delay pada perusahaan sampel dibawah batas ketentuan dari Ketua Bapepam dan LK yaitu kurang dari 90 hari. Nilai maksimum dari ukuran perusahaan adalah 13,96 sedangkan nilai minumnya diperoleh angka sebesar 10,67.

No	Kategori	Frekuensi	Presentase (%)
1	Ukuran KAP		
	a. KAP yang tidak bekerjasama dengan KAPA <i>The Big Four</i> .	60	51,7
	b. KAP yang bekerjasama dengan KAPA <i>The Big Four</i> .	56	48,3
2	Auditor Internal		
	a. Tidak memiliki pengungkapan auditor internal pada struktur organisasi.	49	42,2
	b. Memiliki pengungkapan auditor internal pada struktur organisasinya.	67	57,8

Perusahaan menggunakan jasa audit KAP bekerjasama KAPA Non The Big Four sebanyak 60 perusahaan jumlah presentase 51,7%. Sedangkan sisanya sebanyak 56 perusahaan menggunakan jasa audit KAP tidak bekerjasama dengan KAPA The Big Four jumlah presentase 48,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan jasa audit KAP yang tidak bekerjasama dengan KAPA The Big Four.

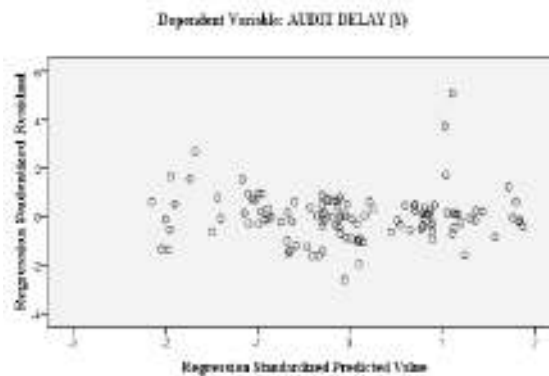
Uji Asumsi Klasik

1. Multikolonieritas

Model	Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Ukuran Perusahaan	0,771	1,297	Non Multikolonieritas
	Ukuran KAP	0,799	1,252	Non Multikolonieritas
	Auditor Internal	0,940	1,064	Non Multikolonieritas

Penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas pada data penelitian. Dilihat dari nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.

2. Heterokedastisitas



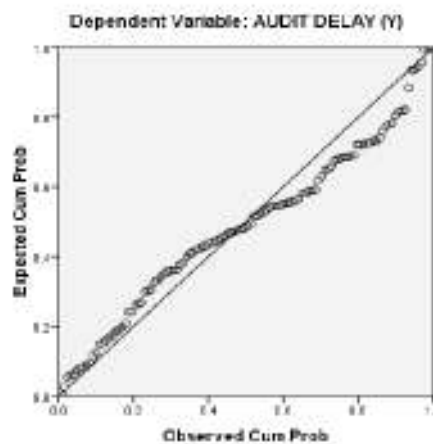
Dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

3. Autokorelasi

Model	d_{T-1}	d_t	$4-d_t$	DW	Kesimpulan
1	1,769	1,626	2,374	1,015	Ada korelasi positif

Pada data penelitian terdapat autokorelasi positif yang ditimbulkan dari hasil uji.

4. Normalitas



Titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya dapat disimpulkan data penelitian terdistribusi secara normal.

Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
Konstan	12,379	26,668	0,464	0,643
Ukuran Perusahaan (X1)	-5,061	2,178	-2,324	0,022
Ukuran KAP (X2)	-6,366	3,224	-1,975	0,051
Auditor Internal (X3)	9,951	3,007	3,310	0,001
Adjusted (R2)	0,104			
F Hitung	5,427			
Prob. (F-Sig)	0,002			

$$Y = 12,379 + 5,061 x_1 - 6,366 x_2 + 9,951 x_3 + e$$

H₁ diterima yaitu ukuran perusahaan berpengaruh atas audit delay, hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sistya R (2008) dan Zooana Farida P, dkk (2013). Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya ukuran perusahaan yang diukur dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mendorong pihak manajemen untuk segera menerbitkan laporan keuangan karena mendapatkan tekanan dari pihak eksternal serta menjaga nama baik dari perusahaan.

H₂ ditolak yaitu ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Lia Permatasari (2012), Greta J dan Rutji S (2012) dan Zooana Farida P, dkk (2013). Perusahaan mengalami audit delay tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran KAP, sehingga tidak menjamin menggunakan jasa audit dari KAP yang tidak bekerjasama dengan KAPA The Big Four akan mengalami audit delay yang lebih lama dibanding dengan KAP yang berafiliasi dengan KAPA The Big Four.

H₃ diterima yaitu auditor internal berpengaruh terhadap audit delay, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lia Permatasari (2012). Ditarik kesimpulan dengan tidak adanya auditor internal diukur dari pengungkapan struktur perusahaan dapat membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor independen menjadi semakin lama dikarenakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kemungkinan belum baik dan perlu membutuhkan waktu tambahan bagi auditor independen untuk melakukan audit terhadap SPI perusahaan.

REFERENSI

- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Amir Abadi Jusuf. 2013. "Jasa Audit dan Assurance". Diterjemahkan oleh: Desti Fitriani. Salemba Empat. Jakarta.
- Andi Kartika. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Hal: 152-171.
- Elen Puspitasari, Anggraeni Nurmala Sari. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (Audit Delay) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol 9, 1-90.
- Greta Juanita, Rutji Satwiko. 2012. "Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 14, No 1, Hlm 31-40.
- Hichem Khelif, Khaled Samaha. 2016. "Audit Committee Activity and Internal Control in Egypt; Does External Auditor's Size Matter?". *Managerial Auditing Journal*, Vol 31, No 3: 269-289.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta. Ikatan Akuntan.
- Kiki Prasilya Putri, Nur Fadrih Asyik. 2015. "Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Delay". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4, No 9.

- Lia Permatasari. 2012. "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol XI, No 21.
- Meylisa Januar Iskandar, Estralita Trisnawati. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 12, No 3, Hlm 175-186.
- Selvia Eka Rahmawati, Bambang Suryono. 2015. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit Delay". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4, No 7.
- Shinta Widhiasari, Budiarta. 2016. "Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi auditor dan Pergantian Auditor terhadap Audit *Report Lag*". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 15,1, 200-227.
- Silvia Angruningrum, Wirakusuma. 2013. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada *Audit Delay*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5.2: 21-270.
- Sistya Rachmawati. 2008. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10, No 1, 1-10.
- Sukrisno Agoes. 2013. "Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Zoana Farida Panjaitan, Wahidahwati, Lailatul Amanah. 2013. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness atas Penyampaian Laporan Keuangan". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 2, No 11.



p-ISSN 2088-768X



9 772088 768028

e-ISSN 2540-9646



9 772540 964029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 121, YOGYAKARTA
Telp & Fax : (0274) 557455